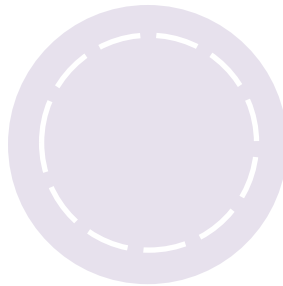
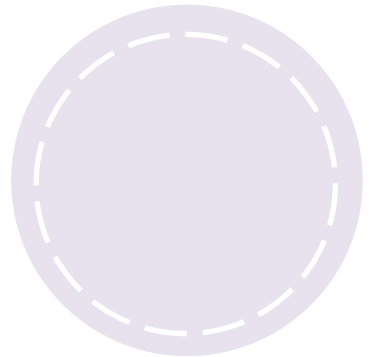


# RENCANA KERJA 2024



**DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**MAKASSAR, 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulsel Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Sulsel Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun I (pertama) atau tahun awal pelaksanaan RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Dokumen Renja ini menggambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, serta memuat hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai langkah awal dalam menentukan arah dan kebijakan kita agar tahapan perencanaan pembangunan lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya, Terima kasih.

Makassar, 24 Juli 2023

Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sulawesi Selatan,



**Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19650531 199111 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK .....	viii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah.....	1
1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah .....	1
1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3
1.2. LANDASAN HUKUM.....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	8
1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	9
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	9
BAB II    HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangktd Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023 .....	11
2.1.1. Pendapatan Daerah.....	11
2.1.2. Belanja Daerah .....	12
2.1.3. Gambaran Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2018-2023.....	12
2.1.3.1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	12
2.1.3.2. Pertanahan .....	24
2.1.4. Faktor Penyebab Keberhasilan terhadap Pencapaian Target Kinerja Pada Tahun 2022 .....	55
2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Target pada Sasaran Renstra Dinas Perkimtan .....	56
2.1.6. Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab .....	56

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	57
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH .....	61
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	62
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..	78
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN</b>	
<b>PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SULAWESI SELATAN</b>	<b>102</b>
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	102
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SULAWESI SELATAN .....	106
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	108
3.3.1.Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan .....	108
3.3.2.Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	109
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>129</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>148</b>
5.1. KAIDAH PELAKSANAAN .....	148
5.2. KESIMPULAN .....	150

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel II.1 Realisasi Pendapatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2022 .....	11
Tabel II.2 Pengurangan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2022 .....	18
Tabel II.3 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	19
Tabel II.4 Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022 .....	23
Tabel II.5 Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang selesai Tepat Waktu Provinsi Sulawesi Selatan .....	25
Tabel II.6 Persentase Sengketa Tanah Negara Kewenangan Provinsi yang Difasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022 .....	26
Tabel II.7 Persentase Penatagunaan Tanah Sesuai Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah di 24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021 .....	27
Tabel II.8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan (Tc.29).....	28
Tabel II.9 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan (Tc.30) .....	59
Tabel II.10 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan (Tc.31) .....	63
Tabel II.11 Usulan Program Kegiatan Berdasarkan Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD Prov. Sulawesi Selatan (Tc.32).....	79
Tabel II.12 Usulan Program Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Tc.32).....	93
Tabel III.1 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PUPR 202-204 Per Program (Rp.Juta) .....	105
Tabel III.2 Matriks Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran DISPERKIMTAN Prov. Sulsel .....	107
Tabel III.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 .....	111

Tabel IV.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,  
Dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024..... 130

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Hal.</b>
Gambar I.1   Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah .....	2

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik II.1 Perbandingan Capaian Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2018 – 2022 .....	14
Grafik II.2 Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Berdasarkan Komponen Kelayakan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022 .....	15
Grafik II.3 Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	16
Grafik II.4 Rasio Rumah Layak Huni di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 .....	16
Grafik II.5 Pengelompokan Rasio Rumah Layak Huni dan Jumlah Rumah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel Tahun 2022 .....	17
Grafik II.6 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022 .....	18
Grafik II.7 Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	21



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

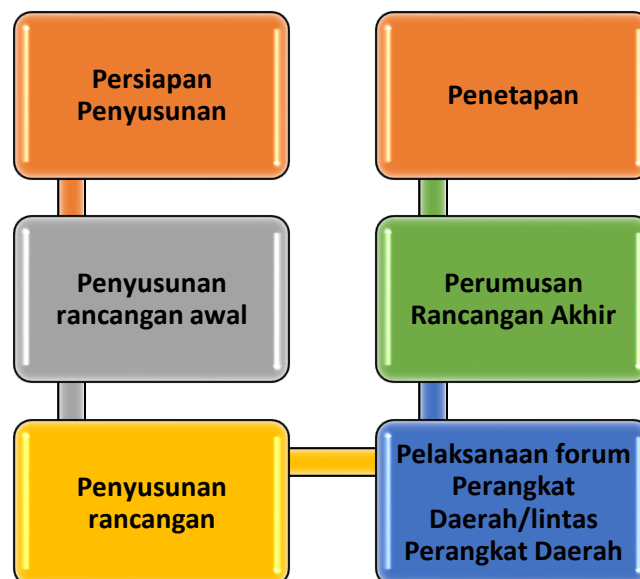
##### **1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan meliputi Pengolahan data dan informasi,
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Menganalisis gambaran pelayanan OPD, Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD,
3. Penyusunan Rancangan Renja, Mengidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD,

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah,
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD,
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

**Gambar I.1**  
**Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah**



Penyusunan Renja Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan menjabarkan rencana kegiatan Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327) yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke 1 (pertama) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, sehingga dalam penyusunan Renja PD Tahun 2024 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2024-2026.

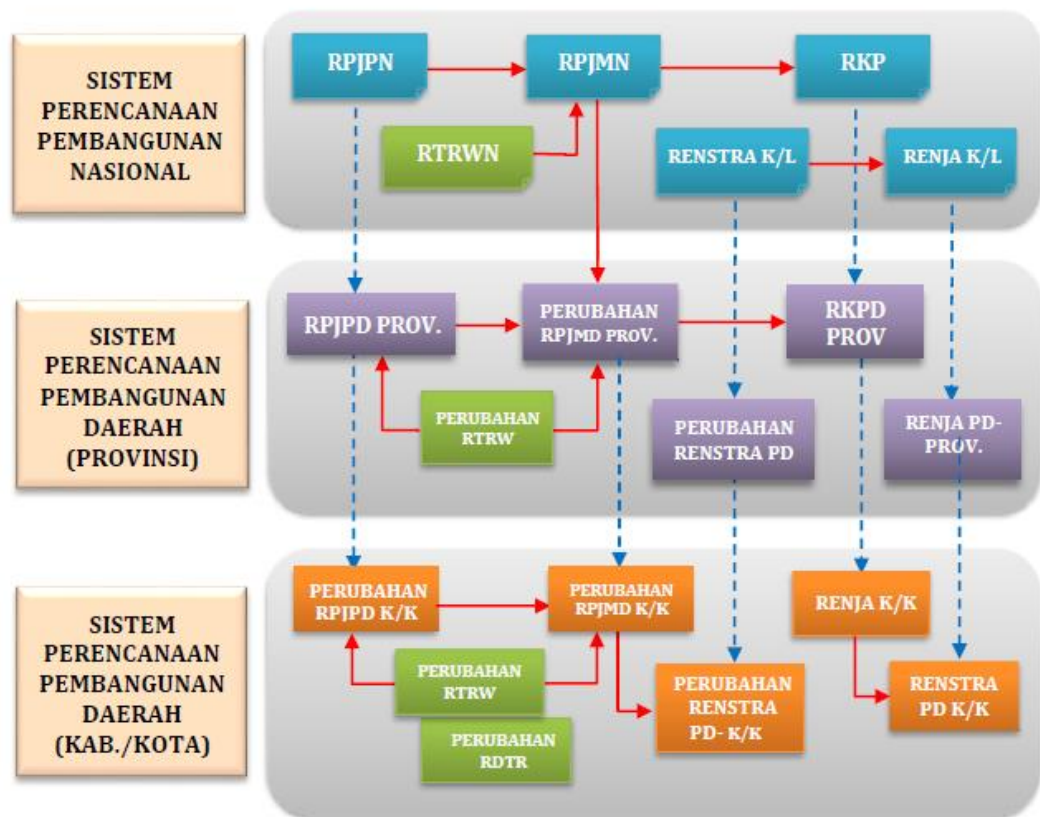
#### **1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penyusunan Renja dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja mengacu pada dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2024-2026, Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 serta mempertimbangkan masukan-masukan dari Kabupaten/kota dan stakeholder terkait dalam Forum Perangkat Daerah serta mempertimbangkan usulan-usulan yang merupakan pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Prov. Sulsel.

Arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Perkimtan Provinsi Sulsel Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan misi jangka menengah Dinas Perkimtan Prov. Sulsel yang tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026. Renja Dinas Perkimtan Prov. Sulsel Tahun 2024 juga merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2024, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKPD Prov. Sulsel Tahun 2024, Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2024-2026, Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi

selatan Tahun 2024-2026, dan dokumen lain yang terkait seperti dapat dilihat skema berikut :

**Gambar I.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan**



Sumber: RKPD 2022 Prov. Sulsel.

## 1.2.Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang

- Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 105);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
25. Keputusan Menteri dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
27. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327)
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321);
30. Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
32. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Nomor 23)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2024;
2. Merumuskan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting



terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan daerah;

3. Menyelaraskan rencana strategis daerah dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah;

### **1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyajian Dokumen Renja dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, pada bab I ini terdiri atas latar Belakang yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD; Landasan hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; Maksud dan Tujuan yang Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah; Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022**

Bab ini menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu, yang menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan dokumen Renja tahun berjalan sebagai bahan acuan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Renja tahun berjalan dan realisasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN;**

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan Program kegiatan dan sub kegiatan beserta kerangka pendanaan.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;**

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan dalam rencana strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024.

### **BAB V PENUTUP;**

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

##### 2.1.1. Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2022 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki target pendapatan sebesar **Rp. 560.200.000,-** yang bersumber dari Sewa Ruangan ATM, Sewa Kantin Umum, Retribusi Pelataran Taman Pakui Sayang dan Retribusi Rusunawa dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 diperoleh sebesar **Rp.311.087.000,-** atau **55.53%.**

Target yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi dan hanya tercapai sebesar 55.53% atau sebesar Rp.311.087.00, hal tersebut disebabkan kurangnya capaian pendapatan dari Retribusi Taman Pakui Sayang baik dan sewa kantin umum, selain itu juga di sebabkan kurangnya capaian Retribusi dari Rusunawa, hal ini karena banyaknya fasilitas pada Rusunawa yang sudah rusak sehingga tidak layak untuk disewakan sementara anggaran untuk pemeliharaan tidak memadai.

**Tabel II.1 Realisasi Pendapatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2022**

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2022 (Rp)	REALISASI 2022		KET
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
<b>1</b>	<b>Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan</b>				
	- Lahan Parkir Taman Pakui Sayang	20,000,000	6,387,000	31.94	tidak tercapai
	- Pemakaian Kamar Rumah Susun	275,000,000	224,915,000	81.79	tidak tercapai
	- Pemakaian Kantin Umum	100,800,000	43,390,000	43.05	tidak tercapai
<b>2</b>	<b>Retribusi Penyewaan Tanah</b>				
	- Pemakaian Lahan ATM Bank BNI	18,000,000	18,000,000	100.00	tercapai
	- Pemakaian Lahan ATM Bank Sulselbar	14,400,000	14,400,000	100.00	tercapai
<b>3</b>	<b>Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>				
	- Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga Taman Pakui Sayang	132,000,000	3,995,000	3.03	tidak tercapai
	<b>Jumlah</b>	<b>560,200,000</b>	<b>311,087,000</b>	<b>55.53</b>	<b>tidak tercapai</b>

### **2.1.2. Belanja Daerah**

Anggaran Belanja Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan pada APBD tahun 2022 sebesar Rp. 61.799.239.457,- yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 37.821.514.657,- dimana Belanja Pegawai sebesar Rp. 11.579.445.233,- untuk membiayai gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebanyak 98 Orang. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 26.242.069.424,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 23.977.724.800,- untuk melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan.

Realisasi Belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 56.392.705.826,04,- (91,25%) dari total anggaran belanja. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 35.585.168.295,04,- (94,09%) dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 20.807.537.531,- (86,78%) sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

### **2.1.3. Gambaran Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel tahun 2018-2023**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023, mempunyai tugas menyelenggarakan 2 Bidang Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.

#### **2.1.3.1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

##### **1. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi**

Pada tahun 2020 pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penanganan Bencana Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1707/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan penanganan bencana skala provinsi di Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Bantuan keuangan tersebut dialokasikan untuk

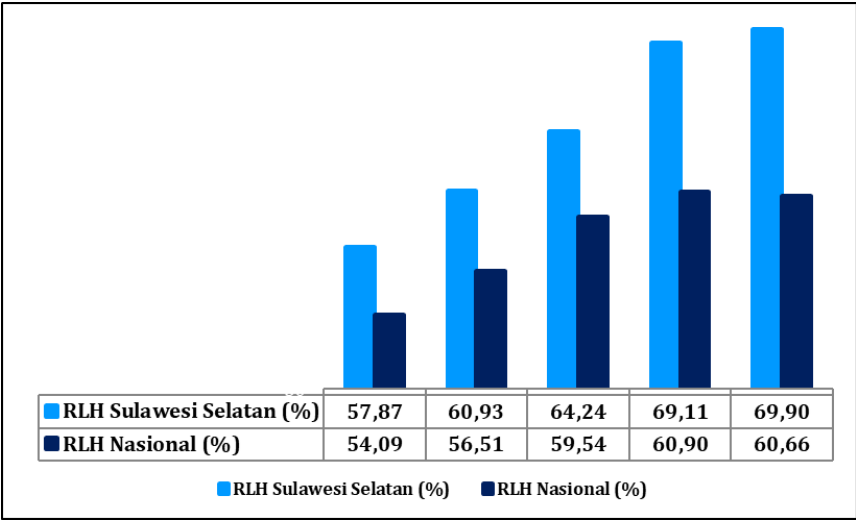
bantuan logistik, penyediaan hunian sementara (Huntara) serta pembangunan rumah baru atau hunian tetap (Huntap). Adapun yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 50 unit rumah, serta 72 unit rumah dari pendanaan APBN melalui Kementerian PUPR. Pada tahun yang sama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan untuk penanganan banjir di Kabupaten Bantaeng yaitu pembangunan rumah layak huni sejumlah 69 unit.

Tahun 2021 telah tertangani warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni berupa terbangunnya 886 unit rumah dari pendanaan APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi warga negara korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Luwu Utara. Pada akhir tahun 2021 terjadi bencana alam gempa bumi di Kabupaten Selayar sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan sejumlah 8 Milyar rupiah untuk pembangunan rumah/hunian tetap (Huntap) sejumlah 160 unit rumah bagi warga negara yang terdampak bencana gempa di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain pembangunan Huntap untuk korban bencana, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun prasarana dan sarana utilitas bagi rumah korban bencana berupa pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 160 meter dan Jalan Lingkungan sepanjang 106 meter di Kabupaten Luwu Utara serta pembangunan sistem jaringan air bersih pada daerah rawan bencana di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan panjang jaringan air bersih 13.180 meter serta cakupan rumah tangga terlayani sebesar 1.577 rumah tangga.

Tahun 2022 telah terbangun sejumlah 44 unit rumah layak huni untuk korban bencana masing-masing 11 unit di Kabupaten Jeneponto, Luwu Utara, Soppeng, dan Wajo. Selain itu untuk mendukung penyediaan PSU untuk mendukung daerah rawan bencana, maka dilaksanakan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 575 meter di Kabupaten Pangkep, Maros, Barru, dan Kota Makassar, serta pembangunan 2 unit jaringan air bersih dengan kapasitas masing-masing sebesar 3.000 liter/hari yang melayani sejumlah 80 rumah tangga di Kabupaten

Pangkep. Capaian warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi hanya sebesar 30 persen disebabkan karena tidak terdapatnya program provinsi yang mengharuskan warga untuk direlokasi.

**Grafik II.1Perbandingan Capaian Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022**



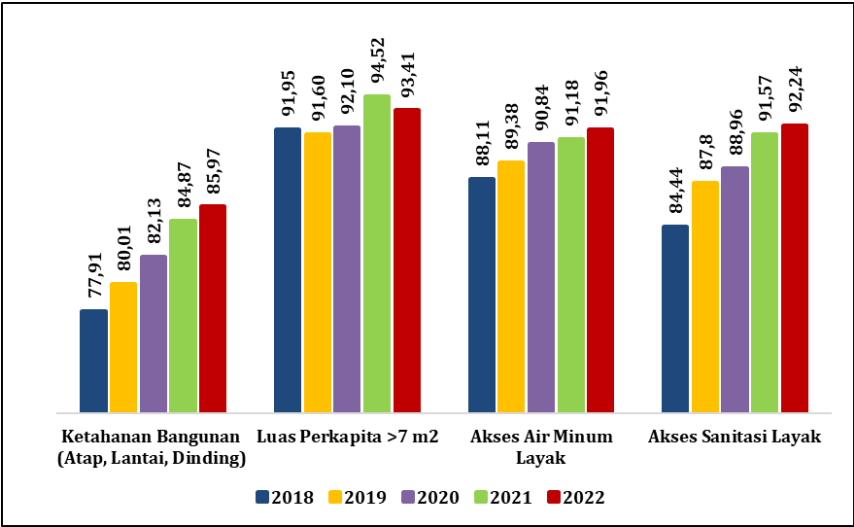
Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Capaian Akses Rumah Tangga terhadap Rumah Layak Huni (RLH) di Sulawesi Selatan Tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dengan capaian sebesar 69,9 persen pada tahun 2022. Capaian RLH Sulawesi Selatan tahun 2022 berada diatas capaian nasional sebesar 60,66 persen serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,14 persen.

Peningkatan akses RLH didukung oleh peningkatan masing-masing komponen kelayakan yang terdiri dari ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding), luas perkapita, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Salah satu komponen penentu rumah layak huni adalah ketahanan bangunan, yang dilihat dari bahan bangunan utama atap, dinding, dan lantai rumah terluas. Persentase rumah tangga di Sulawesi Selatan yang menempati rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan di wilayah kota sebesar 91,02 persen lebih besar dibandingkan wilayah desa sebesar 82,35 persen. Rumah tangga yang menempati rumah dengan atap berupa beton, genteng, kayu/sirap, atau seng sebesar 97,46 persen. Rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, atau batang kayu sebesar 88,75 persen. Sedangkan rumah tangga yang menempati rumah dengan lantai

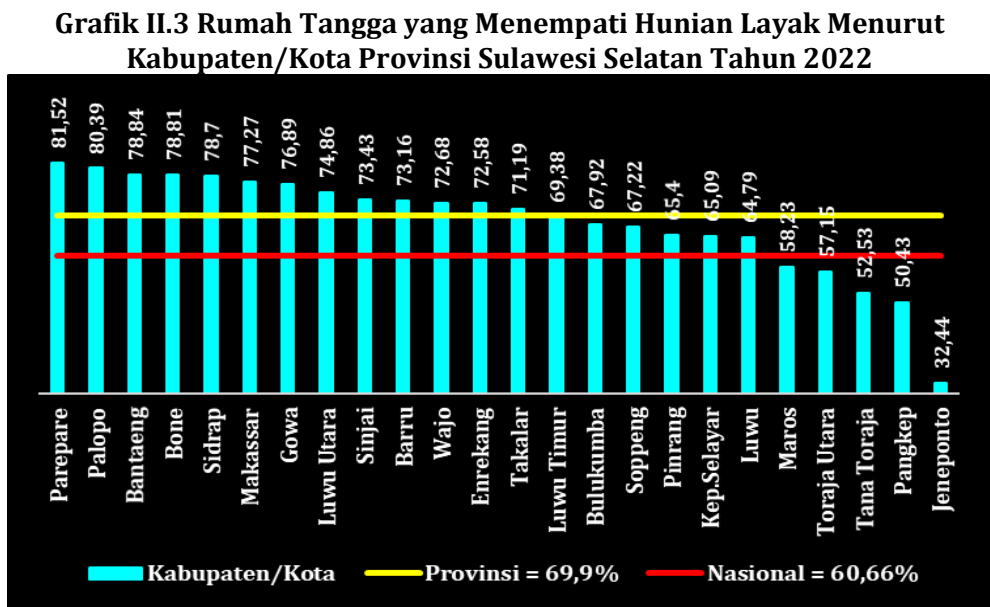
berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin, tegel, teraso, kayu/papan, atau semen/bata merah sebesar 99,31 persen.

**Grafik II.2 Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Berdasarkan Komponen Kelayakan di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

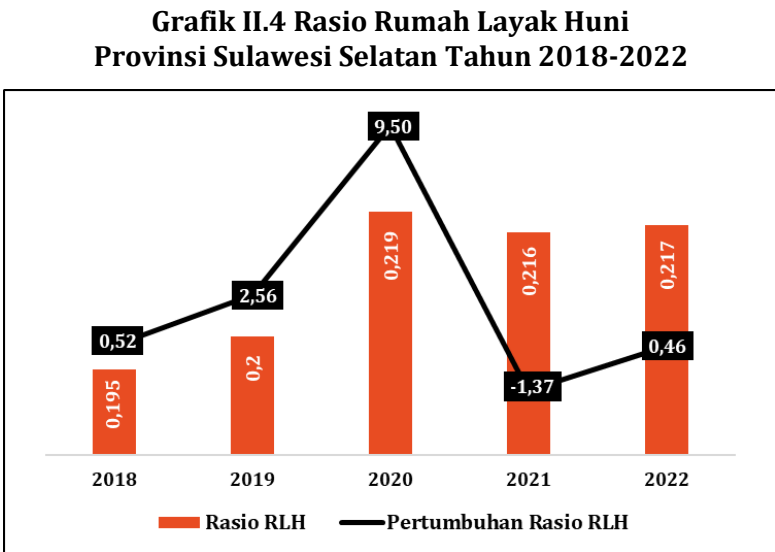


Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak pada tahun 2022 tertinggi di Kota Parepare dengan capaian 81,52 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Jeneponto dengan capaian 32,44 persen. Sejumlah 11 Kabupaten dengan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dibawah capaian Provinsi yaitu Kabupaten Luwu Timur, Bulukumba, Soppeng, Pinrang, Kepulauan Selayar, Luwu, Maros, Toraja Utara, Tana Toraja, Pangkep, dan Jeneponto, serta sejumlah 5 Kabupaten yang berada dibawah capaian Nasional yaitu Kabupaten Maros, Toraja Utara, Tana Toraja, Pangkep, dan Jeneponto.



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023



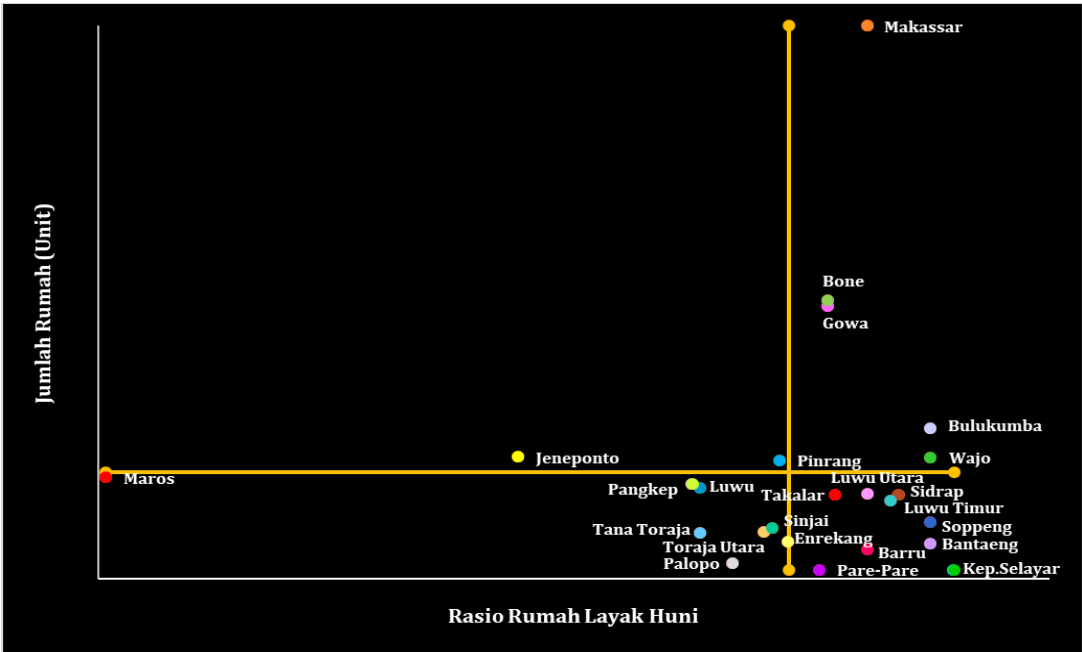
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian, Tahun 2023

Rasio rumah layak huni merupakan perbandingan antara rumah layak huni dan jumlah penduduk, mengalami tren fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,33 persen. Pertumbuhan rasio rumah layak huni tertinggi pada tahun 2020 sebesar 9,5 persen kemudian mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2021, namun kembali mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 0,46 persen. Tahun 2022 rasio rumah layak huni tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,238 dengan jumlah 33.541 unit rumah layak huni dari total 35.132 unit rumah. Sedangkan rasio rumah layak huni terendah di Kabupaten Maros sebesar 0,131 dengan jumlah 51.340 unit rumah layak huni dari total 86.998 unit rumah.



Kabupaten/Kota dengan Rasio Rumah Layak Huni tetinggi pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 0,238 dari 35.132 unit rumah, sedangkan yang terendah di Kabupaten Maros dengan capaian 0,131 dari 86.998 unit rumah.

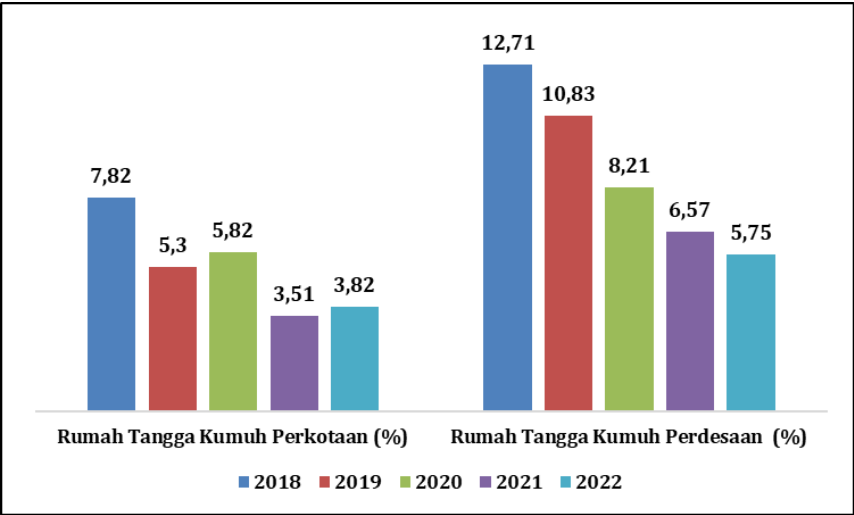
**Grafik II.5 Pengelompokan Rasio Rumah Layak Huni dan Jumlah Rumah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha mendukung pencapaian penurunan luas Kawasan Kumuh pada tahun 2021 sebesar 18,03 persen atau 152,51 Ha kawasan kewenangan provinsi. Tahun 2021 kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha ini dilaksanakan melalui : a) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.757,4 meter di Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, Enrekang, Pinrang, dan Soppeng; b) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 1.729,37 meter di Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, Luwu Timur, Pinrang, dan Soppeng; c) Pengadaan Motor Pengangkut Sampah sejumlah 2 unit di Kabupaten Bantaeng.

Grafik II.6 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Tahun 2022 kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha ini dilaksanakan melalui : a) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.258 meter di Kabupaten Bone, Gowa, Soppeng, Wajo, Sinjai, Luwu Timur, Luwu Utara, Takalar, dan Kota Palopo; b) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 2.225 meter di Kabupaten Enrekang, Gowa, Soppeng, Wajo, Jeneponto, Takalar, Maros, Luwu Utara, Bantaeng, Kota Makassar; c) Pengadaan Motor Pengangkut Sampah sejumlah 2 unit yang melayani 845 rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur.

Capaian pengurangan kawasan kumuh kewenangan provinsi tahun 2020 hingga 2022 sebesar 300,52 Ha atau 25,39 persen dari total luas kawasan kumuh sebesar 1.183,79 Ha yang tersebar di 20 kabupaten/kota, 52 kecamatan, 91 kelurahan, 97 kawasan melalui pendanaan APBD Provinsi, Program KOTAKU, dan CSR. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.2 Pengurangan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	Realisasi Pengurangan Kawasan Kumuh (Ha)			Tingkat Capaian	
			2020	2021	2022	Luas (Ha)	%
1	Bantaeng	45,8	-	24,16	3,54	27,7	2,34
2	Bone	67,61	-	12,34	4,03	16,35	1,38
3	Bulukumba	10,84	-	-	-	-	-
4	Enrekang	15,62	-	4,4	6,28	10,68	0,9
5	Gowa	213,78	10,11	7,56	5,95	23,62	1,99

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	Realisasi Pengurangan Kawasan Kumuh (Ha)			Tingkat Capaian	
			2020	2021	2022	Luas (Ha)	%
6	Jeneponto	86,2	-	2,4	5,66	8,06	0,68
7	Kep.Selayar	146,18	-	-	-	-	-
8	Luwu	10,43	-	-	-	-	-
9	Luwu Timur	33,57	-	5,65	4,8	10,45	0,89
10	Luwu Utara	70,7	-	-	6,18	6,18	0,52
11	Maros	34,93	-	1,2	2,79	3,99	0,34
12	Pinrang	53,4	-	8,45	-	8,45	0,71
13	Sidrap	36,27	-	-	-	-	-
14	Sinjai	24,66	1,68	-	3,19	4,87	0,41
15	Soppeng	37,99	13,39	21,35	6,35	41,09	3,47
16	Takalar	25,16	-	23,66	7,19	30,85	2,61
17	Toraja Utara	37,98	-	19,44	-	19,44	1,64
18	Wajo	59,72	-	6,34	15,47	21,81	1,85
19	Makassar	77,92	51,35	-	2	53,35	4,51
20	Palopo	95,03	-	-	13,63	13,63	1,15
Total		1.183,79	76,53	136,93	87,06	300,52	25,39

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

Pada Tahun 2023 penentuan Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi kembali diperbaharui melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 969/VI/Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi di Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Sulawesi Selatan seluas 1.151,97 Ha yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.3 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

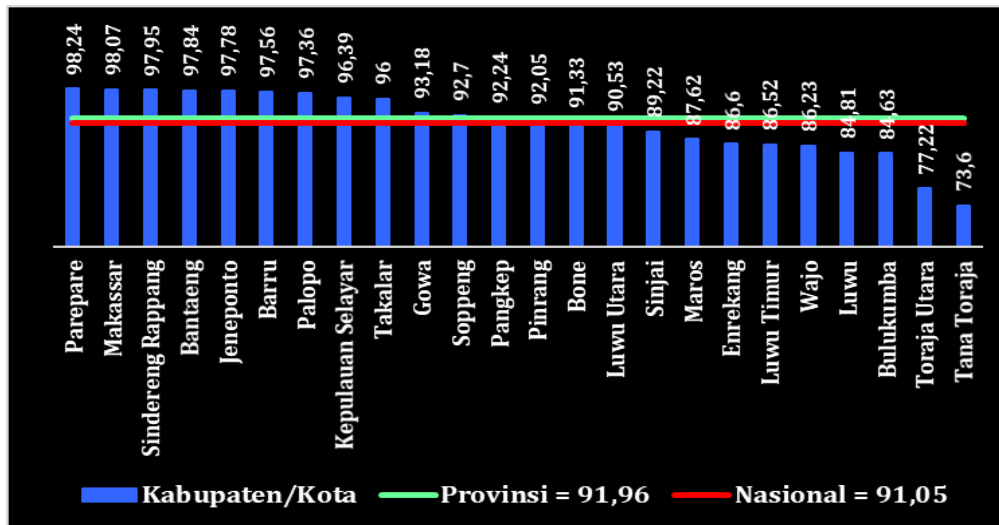
No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (Ha)	Jumlah Kawasan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Kecamatan
1	Bantaeng	14,04	1	1	1
2	Barru	23,5	2	2	2
3	Bone	36,96	3	5	2
4	Bulukumba	24,08	2	6	2
5	Enrekang	134,7	10	10	5

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (Ha)	Jumlah Kawasan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Kecamatan
6	Gowa	10,01	1	1	1
7	Jeneponto	95,84	8	8	6
8	Kepulauan Selayar	93,05	8	8	7
9	Luwu	64,03	7	7	3
10	Luwu Timur	49,7	4	3	3
11	Luwu Utara	14	1	1	1
12	Maros	25,56	2	3	2
13	Pangkajene dan Kepulauan	23,15	2	2	2
14	Pinrang	10,99	1	1	1
15	Sidenreng Rappang	83,15	7	7	5
16	Sinjai	11,5	1	1	1
17	Soppeng	43,23	4	4	2
18	Takalar	22,41	2	2	2
19	Tana Toraja	62,94	5	5	1
20	Toraja Utara	12,28	1	1	1
21	Wajo	34,15	3	2	2
22	Makassar	52,27	5	13	5
23	Palopo	126,41	10	10	7
24	Pare-Pare	84,02	7	3	4
Sulawesi Selatan		1.151,97			

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, capaian persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 91,96 persen serta masih diatas capaian nasional. Sejumlah 11 kabupaten masih berada dibawah capaian provinsi serta 10 kabupaten masih berada di bawah capaian nasional. Tahun 2023 ditargetkan akses rumah tangga terhadap air minum layak di Sulawesi Selatan sebesar 98,02 persen serta ditargetkan dapat mencapai 100 persen pada tahun 2024.

Grafik II. 7 Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pemenuhan air minum layak/ARSINUM di kawasan pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air lainnya sejalan dengan amanah UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar pokok pelaksanaan PSU Permukiman di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun instalasi Air Siap Minum (ARSINUM) di Kawasan pesisir dan kepulauan yang dimulai sejak tahun 2019 sejumlah 1 unit di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar yang merupakan Bantuan Hibah dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2020 telah terbangun instalasi ARSINUM sejumlah 3 (tiga) unit di Pulau Samalona, Pulau Langkai, dan Pulau Lanjukang Kota Makassar. Masing-masing ARSINUM pada 4 lokasi terbangun memiliki kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan pelayanan 625 rumah tangga. Tahun 2021 telah dibangun prasarana Air Bersih pada 4 (empat) lokasi yaitu 1 titik di Kabupaten Bone dengan kapasitas produksi 9.000 liter/jam yang cakupan pelayanannya mampu melayani 600 rumah tangga, serta pembangunan prasarana air bersih pada 3 (tiga) lokasi di Kabupaten Bulukumba masing-masing di Desa Jojolo Kecamatan Bulukumba, Desa Padang Kecamatan Gantara, dan Desa Matekko Kecamatan Gantara dengan kapasitas produksi masing-masing 3.000 liter/jam dengan cakupan layanan hingga 200 rumah tangga. Selain itu terdapat bantuan CSR untuk pembangunan instalasi ARSINUM dari PT.Sucofindo di Pulau Balang Datu Kabupaten

Takalar sehingga pada tahun 2021 dengan cakupan layanan 625 rumah tangga.

Untuk mendukung fungsi hunian pada kawasan permukiman pada tahun 2021 telah dibangun PSU pada kawasan permukiman meliputi : a) Drainase Lingkungan sepanjang 3.576 meter di Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo; b) Jalan Lingkungan sepanjang 1.788 meter di Kabupaten Luwu, Toraja Utara, Bulukumba, Tana Toraja, dan Kota Palopo. Pada tahun 2022 telah dibangun PSU kawasan permukiman yang meliputi: a) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 2.401 meter di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Gowa, Takalar, dan Kota Palopo; b) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.236 meter di Kabupaten Luwu, Bone, Toraja Utara, Takalar, dan Luwu Utara; c) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan permukiman berupa reservoir beton kapasitas 9.500 liter dengan panjang pipa distribusi 1.995 meter di Kabupaten Sinjai serta tandon kapasitas masing-masing 2.000 liter dengan total panjang pipa distribusi 4.427 meter di Kabupaten Sinjai, Jeneponto, Bone, dan Kota Makassar; d) Pembangunan PSU lainnya berupa pembangunan toilet 2 unit di Kabupaten Enrekang dan Kota Makassar serta Rehabilitasi Masjid di Kota Makassar. Selain itu dalam rangka peningkatan penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air lainnya, telah dibangun sejumlah 10 unit instalasi air siap minum (ARSINUM) dengan kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan layanan 625 rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pinrang, Enrekang, Jeneponto, Bulukumba, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, dan Sinjai.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.4 Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM)	%	100	100	100	100	30
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (SPM)	%	100	100	100	100	100
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	%	20,16	52,7	6,67	18,03	25,39
Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	%	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100	100
Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	%	84,41	89,77	93,79	93,98	97,36
Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	%	Belum dilakukan pengukuran	17,1	17,1	100	100
Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	7,15	57,14

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, Tahun 2023

### 2.1.3.2. Pertanahan

#### 1. Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yaitu terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Tahapan persiapan menjadi kewenangan Gubernur yaitu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pembangunan. Fasilitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) pengadaan tanah dan 4 (empat) perpanjangan penetapan lokasi proyek strategis nasional. Tahun 2018 fasilitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum 6 (enam) jenis pengadaan tanah dan diantaranya ada 1 (satu) perpanjangan penetapan lokasi proyek strategis nasional. Untuk tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) pengadaan tanah yang beberapa diantaranya hanya dilakukan perpanjangan penetapan lokasi, sedangkan tahun 2020 sejumlah 5 (lima) pengadaan tanah. Berdasarkan Perpres Nomor 190 Tahun 2020 bahwa Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan Perpanjangan dan Pembaruan Penetapan Lokasi jika Pengadaan tanahnya masih terus berjalan.

Pada tahun 2021 regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengalami perubahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan ketentuan pelaksanaannya diatur oleh Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) pengadaan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi sejumlah 8 kegiatan pengadaan tanah antara lain proyek prioritas provinsi dan proyek strategis Nasional yang permohonannya diajukan pada akhir tahun 2021 tetapi dilakukan perpanjangan dan penetapan lokasinya pada tahun 2022. Adapun kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimaksud antara lain :

1. Pembangunan Jalan Bypass Mamminasata di Kabupaten Maros seluas ± 15,21 Ha;



2. Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare (Segmen E) untuk Kabupaten Maros dan Kota Makassar seluas ± 83,94Ha;
3. Pembangunan Runway Bandara Bua di Kabupaten Luwu seluas ± 18Ha;
4. Pembangunan Akses Jalan Bandara Bua-Toraja Utara di Kabupaten Luwu seluas ± 8,37Ha;
5. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Baliase di Luwu Utara seluas ± 30,15Ha;
6. Pembangunan Genangan Tanggul Hulu Bendung D.I Gilireng di Kabupaten Wajo seluas ± 67,43Ha;
7. Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar seluas ± 307,27Ha;
8. Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Gowa seluas ± 47Ha.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat berjalan tepat waktu didorong oleh pelaksanaan sosialisasi yang masif, koordinasi semua pihak yang berkepentingan serta transparansi dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah. Faktor penghambat diantaranya alas hak pemilik lahan yang tidak lengkap atau terjadi sengketa kepemilikan, terjadi penolakan dan gugatan terkait dengan nilai yang ditetapkan oleh Appraisal, pemilik tidak diketahui keberadaannya dan adanya provokasi dari pihak yang berkepentingan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala yang besar dilaksanakan secara multiyears karena luasnya lahan yang diperlukan, banyaknya pemilik bidang tanah serta anggaran yang diperlukan.

**Tabel II.5 Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

Indikator	Sat	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	140	83,30	100	100

Sumber: Bidang Pertanahan Disperkimtan Prov. Sulsel

## 2. Persentase Sengketa Tanah Negara Kewenangan Provinsi yang Difasilitasi

Jumlah Sengketa Tanah diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 terdapat 6 pengaduan, presentase aduan yang terfasilitasi sebesar

60%. Jumlah Sengketa Tanah diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 terdapat 10 pengaduan, presentase aduan yang terfasilitasi sebesar 100%. Jumlah sengketa tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 sejumlah 10 pengaduan dengan persentase aduan yang terfasilitasi sebesar 60%. Jumlah sengketa tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sejumlah 10 pengaduan dengan persentase aduan yang terfasilitasi sebanyak 83.33%. sedangkan untuk Tahun 2022 Jumlah sengketa tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 6 Pengaduan dan persentase aduan yang terfasilitasi sebesar 100%

**Tabel II.6 Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

Indikator	Sat	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	60	100	60	83,33	100

Sumber: Bidang Pertanahan Disperkimtan Prov. Sulsel

### 3. Persentase Penatagunaan Tanah Sesuai Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah di 24 Kab/Kota

Kegiatan penatagunaan tanah mulai diprogramkan pada tahun 2021 dan tetap berlanjut di Tahun 2022, telah dilaksanakan konsolidasi penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar awal penyusunan Dokumen Data Base Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen Data Base Pertanahan akan memberikan informasi terkait dengan Penatagunaan Pertanahan dan kondisi Pertanahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Dokumen Data Base Pertanahan akan terus dilakukan perbaikan dan pembaruan setiap tahun sesuai dengan data dan informasi yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya. Kegiatan Penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota serta kegiatan Konsolidasi dan Koordinasi yang dilakukan pada Tahun 2022 antara lain :

1. Melakukan Koordinasi terkait tentang Permohonan Persetujuan Izin Pelepasan Tanah Kas Desa di Kabupaten Wajo.
2. Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah di Kab Bone.

- Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv Sulawesi Selatan sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah Kab. Sinjai.
- Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv Sulawesi Selatan sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah Kab. Bulukumba.
- Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah di Kabupaten Soppeng.
- Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah di Kabupaten Soppeng.
- Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kosolidasi Tanah Kewenangan Provinsi di Kabupaten Takalar

**Tabel II.7 Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021**

Indikator	Sat	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	Belum dilakukan pengukuran			100	100

Sumber: Bidang Pertanahan Disperkimtan Prov. Sulsel

Capaian Kinerja Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d triwulan I Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan (Tc.29)**

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan										
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM)	%	100	100	100	30	30	100	100	100
						Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	4	2	01.01		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi	Dokumen	15	15	5	5	100	5	20	133.33
1	4	2	01.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	Dokumen	3	11	1	1	100	1	12	400
1	4	2	01.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66.67
1	4	2	01.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah berdasarkan tingkat kerusakan akibat bencana	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66.67
1	4	2	01.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan penerima rumah korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah hasil verifikasi	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66.67
1	4	2	01.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen hasil pendataan Rumah sewa milik masyarakat, Rumah susun dan Rumah Khusus	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66.67

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
						yang dimanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan									
1	4	2	01.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	Orang	540	197	205	219	106.83	195	416	77,04
1	4	2	01.02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat /sukarelawan tanggap bencana	Orang	150	75	50	50	100	50	125	83,33
1	4	2	01.02	2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan	Orang	150	72	40	40	100	50	112	74,66
1	4	2	01.02	3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPRFLPP	Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi Mekanisme Akses pembiayaan Perumahan Bersubsidi KPR FLPP	Orang	150	50	80	80	100	50	130	86,66
1	4	2	01.02	4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping	Jumlah Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang	Tim	3	3	3	3	100	3	6	200

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
					dan Fasilitator	terbentuk									
						Jumlah SDM yang terlatih sebagai TIM Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Orang	90	0	45	49	108,89	50	49	54,44
1	4	2	01.02	5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana yang mengikuti rembug warga	Orang	75	25	25	25	100	25	50	66,67
1	4	2	01.02	6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah koordinasi yang dilakukan untuk menyepakati penerima dan jenis layanannya	Kali	3	1	1	2	200	1	3	100
1	4	2	01.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun	Unit	88	20	44	44	100	40	64	72,72
1	4	2	01.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi	Unit	88	20	44	44	100	40	64	72,72
1	4	2	01.03	2	Penyusunan Site Plan dan atau Detail Engineering Design DED bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen DED rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas kawasan kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	%	36,37	18,03	23,42	25,39	108,41	36,37	25,39	69,81
1	4	3	01.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha	Jumlah dokumen penataan kawasan permukiman kumuh	Dokumen	3	2	1	1	100	1	3	100
1	4	3	01.01	2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah aparat dan KSM yang mengikuti bimtek/sosialisasi	orang	600	0	50	75	150	200	75	12,5
1	4	3	01.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan PemugaranPeremajaanPemukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/Peremejaan/Permukiman Kembali permukiman kumuh	Laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	3	01.01	9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67



Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	4	3	01.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha	Luas kawasan kumuh tertangani	Ha	300	136,93	100	87,06	87,06	120	223,99	74,66
1	4	3	01.02	1	Penyusunan Rencana Tapak Site Plan dan Detail Engineering Design DED Peremajaan Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha	Jumlah dokumen DED peremajaan/pemugaran permukiman kumuh kewenangan provinsi	Dokumen	27	26	4	4	100	9	30	111,11
1	4	3	01.02	7	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha	Jumlah pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha	Kawasan	27	10	9	15	166,67	9	25	92,59
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	Persentase Rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	%	93	93,98	92	97,36	105,83	93	97,36	0

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
						Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan pesisir dan Kepulauan	%	100	100	100	100	100	100	200	200
						Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	%	100	195,9	80	100	125	100	295,9	295,9
1	4	5	01.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pesisir dan Kepulauan	Kawasan	48	32	35	35	100	21	67	139,58
1	4	5	01.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PSU Air Bersih Layak / Arsinum permukiman	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PSU drainase permukiman	Dokumen	3	4	1	9	900	1	13	433,33
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PSU Jalan Lingkungan permukiman	Dokumen	3	3	1	8	800	1	11	366,67
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PSU fasilitas umum permukiman	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	4	5	01.01	2	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah PSU Fasilitas Umum permukiman yang terbangun	Kawasan	3	0	2	2	100	2	2	66,67
						Jumlah PSU Drainase permukiman yang terbangun	Kawasan	21	17	12	12	100	15	29	138,09
						Jumlah PSU Jalan Lingkungan permukiman yang terbangun	kawasan	9	11	6	6	100	4	17	188,89
						Jumlah PSU Air Bersih Layak / Arsinum permukiman yang terbangun	Titik	15	4	15	15	100	6	19	126,67
1	4	5	01.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan PSU Permukiman	Rekomendasi	3	6	1	1	100	1	7	233,33
1	4	5	01.01	5	Kerja Sama Penyediaan Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah kawasan PSU Permukiman yang dikerjasamakan	Kawasan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	6			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	7,15	57,14	57,14	100	100	64,29	64,29

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	4	6	01.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU	Pengembang	35	0	15	20	133,33	15	20	57,14	
1	4	6	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah	Kali	30	9	9	9	100	9	18	60	
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	100	99	100	100	100	100	100	100	
						Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	4	1	01.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
						tepat waktu									
1	4	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Pokok yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67
						Jumlah dokumen Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	4	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1	4	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
1	4	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen anggaran hasil pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang benar dan lengkap sesuai standar keuangan	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen hasil tanggapan pemeriksaan	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	Laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
					Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan triwulanan SKPD	Laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
						Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	Laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	5	4	4	100	4	9	75
1	4	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Laporan	3	2	1	2	200	1	4	100
1	4	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang diamankan	Laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pembukuan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
						Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	4	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pasang	357	0	0	0	0	119	0	0
1	4	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang didata dan dikelola administrasi kepegawaiannya	Orang	119	106	103	103	100	119	209	175,63
1	4	1	01.05	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	Orang	119	106	103	103	100	119	209	175,63
1	4	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	60	20	20	60	300	20	80	133,33
1	4	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis	66	22	16	22	137,50	22	44	66,67
1	4	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	60	4	5	18	360	20	22	36,67
1	4	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	jenis	36	12	0	0	0	12	12	33,33



Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	4	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	Jenis	48	16	14	14	100	16	30	62,5
1	4	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	3	0	0	0	0	1	0	0
1	4	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel kantor yang tersedia	Jenis	6	0	0	0	0	2	0	0
1	4	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air, listrik dan Wifi	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
1	4	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	3	1	1	1	100	1	2	66,67
1	4	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	10	10	10	22	220	10	32	320

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	4	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	6	10	6	8	133,33	6	18	300
1	4	1	01.09	9	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	Unit	3	1	1	2	200	1	3	100
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan										
2	1	3			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaantanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	1	3	01.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Lokasi	15	3	5	8	160	7	11	73,33

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
2	1	3	01.01	1	Pemberitahuan Pendataan Awal Lokasi Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Dokumen	3	3	5	7	140	1	10	333,33
2	1	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	1	4	01.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah	Kasus	18	10	6	6	100	7	16	88,89
2	1	4	01.01	1	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah data sengketa pertanahan yang difasilitasi	Data	18	10	6	7	116,67	7	17	94,44
2	1	4	01.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah data sengketa tanah yang dimediasi	Data	18	10	6	7	116,67	7	17	94,44
2	1	1			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja capaian program (Perubahan renstra tahun 2018 s/d 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program/ kegiatan/ sub kegiatan renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
										Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
						kab/kota									
2	1	1	01.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah KabupatenKota dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67
2	1	1	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66,67
2	1	1	01.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan provinsi	Kali	15	5	5	5	100	5	10	66,67

Sumber : E-Monev Prov. Sulsel, diolah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel berdasarkan tugas dan fungsi melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan yang dijabarkan dalam 8 (delapan) Program 17 (tujuh belas kegiatan) dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2022 berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dengan hampir semua Program Kegiatan dan sub kegiatan mampu mencapai target bahkan ada yang mampu melampaui dari target yang telah ditetapkan, meski demikian juga masih terdapat beberapa sub kegiatan yg capaiannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terbagi atas 8 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:**

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri 5 Sub kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan uraian yaitu Dokumen Rencana Kerja (Pokok Tahun 2022 dan Perubahan Tahun 2021), Dokumen RKA Pokok dan Perubahan, Dokumen DPA Pokok dan Perubahan, Laporan Kinerja.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 7 Kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terdiri atas 3 Sub kegiatan dengan capaian kinerja sebanyak 5 Dokumen.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri atas 3 Sub kegiatan yang rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri atas 3 Sub kegiatan yang rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terlaksana dengan capaian 100%
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan capaian

kinerja 100%

## **2. Program Pengembangan Perumahan yang terdiri dari 3 kegiatan dan 13 Sub kegiatan**

### **a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**

- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi

Telah tersusun dokumen data Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi pada Kab/kota yang berisi gambaran lokasi kejadian, jenis bencana, tingkat kerawanan bencana (rendah, sedang, tinggi), luas perumahan (Ha), Jumlah rumah (unit), Kondisi fisik rumah dan Status kepemilikan rumah.

- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani

Telah tersusun Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani yang berisi tentang Jenis Bencana, Tahun terjadinya bencana, Lokasi, Nama KK, NIK, Jumlah anggota keluarga, Kondisi ekonomi keluarga (MBR/Non MBR), Tingkat kerusakan rumah (ringan, sedang, berat) dan Status Kepemilikan Rumah.

- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

Telah tersusun dokumen tingkat kerusakan rumah akibat bencana yang didalamnya terdiri dari Form A berupa data Identitas, Gambar bagian-bagian rumah dan kolom detail kerusakan rumah serta Form B rekapitulasi identifikasi kerusakan rumah.

- Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi.

Berupa format pengisian Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang memuat nama penerima dan readiness criteria (RC) calon penerima manfaat atau Verifikasi calon penerima Rumah bagi korban bencana dilaksanakan

sebelum menentukan siapa saja yang akan menjadi penerima manfaat.

Form A berupa data penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi dan Form B berupa surat pernyataan penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi

- Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus

Telah tersusun dokumen yang memuat tentang data lokasi rumah sewa (alamat rumah, jumlah rumah sewa, kondisi fisik rumah sewa, tarif sewa perbulan, pemilik rumah sewa), Rumah susun (lokasi, jumlah rusun, jumlah RT, KK dan jiwa, Kondisi fisik, tarif sewa dan pengelola) dan rumah khusus (Lokasi jumlah unit, jumlah RT, KK dan jiwa, kondisi fisik, tarif sewa dan pengelola) Berupa dokumen data yang memuat tentang lokasi rumah sewa (Alamat Rumah, jumlah rumah sewa, kondisi fisik rumah sewa, tarif sewa perbulan, pemilik rumah sewa), Rumah susun (Lokasi, Jumlah Rusun, Jumlah RT, KK dan jiwa, Kondisi fisik, tarif sewa dan pengelola) dan rumah khusus (Lokasi jumlah unit, jumlah RT, KK dan jiwa, kondisi fisik, tarif sewa dan pengelola).

- b. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

- Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat Sukarelawan Tanggap Bencana

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah memberikan advokasi dan informasi terkait Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan tanggap bencana di kabupaten/kota.

- Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan

Telah dilaksanakan Sosialisasi tentang mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan yang melibatkan

stakeholder dari 24 kabupaten/kota. Kegiatan ini dimaksudkan meminimalisir konflik pertanahan yang memerlukan penanganan masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan dan bertujuan untuk terfasilitasinya penanganan permasalahan urusan mekanisme pergantian hak atas tanah dan bangunan.

- Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP

Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP dihadiri oleh pihak perbankan (Bank BTN dan Bank Sulselbar) selaku pemberi pembiayaan dan asosiasi perumahan REI dan APERSI. Sosialisasi yang dilaksanakan terkait peran perbankan dan asosiasi dalam pengembangan perumahan dan mekanisme KPR-FLPP

- Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel telah membentuk Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi tingkat kerusakan rumah dalam rangka penyusunan rencana aksi.

- Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan Rapat bersama pemerintah setempat dan calon penerima manfaat dalam rangka penentuan Penerima Rumah Bagi Korban bencana.

- c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel pada tahun 2022 telah merehabilitasi Rumah warga negara Korban bencana sebanyak 44 unit yg tersebar di 4 Kabupaten yaitu Kab. Jeneponto, Kab. Luwu Utara, Kab. Wajo dan Kab. Soppeng. Rehabilitasi Rumah Korban bencana selain



sebagai upaya pencapaian SPM Perumahan juga menjadi Program Prioritas yang dilaksanakan pada Tahun 2022.

- Penyusunan *Site Plan* dan/atau *Detail Engineering Design DED* bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi  
Telah tersusun Dokumen Perencanaan atau 1 Dokumen DED Rehabilitasi Rumah Warga Negara korban Bencana yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan.

### 3. Program Kawasan Permukiman

a. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha

- Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh

Kegiatan Penyadaran Publik terkait pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh telah dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran Peremajaan Pemukiman Kembali Permukiman kumuh

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam penanganan Kawasan dan Permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi ke Kabupaten/Kota, Kementerian dan Instansi terkait lainnya mengenai Sinkronisasi data target dan capaian kumuh juga melakukan Verifikasi dan *update* data luas Kawasan Kumuh berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 4.073 Ha di mana terdapat 1.183 Ha yang penanganannya menjadi kewenangan Provinsi. Dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, dalam hal ini juga difasilitasi oleh Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas inisiasi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel melakukan rapat-rapat Koordinasi dengan menghadirkan OPD Kab/kota yang

terkait dengan Permukiman dan Kawasan Kumuh, juga melakukan upaya langkah-langkah kerjasama dengan Perusahaan melalui program tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak Site Plan dan Detail Engineering Design DED Peremajaan Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha.

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini berupa tersusunnya Dokumen Rencana Tapak (*Site Plan*) dan DED Revitalisasi Kawasan Kumuh pada 4 kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas Sepuluh Ha sampai dengan di Bawah Lima Belas Ha

Tahun 2022 kegiatan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha ini dilaksanakan melalui : a) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.258 meter di Kabupaten Bone, Gowa, Soppeng, Wajo, Sinjai, Luwu Timur, Luwu Utara, Takalar, dan Kota Palopo; b) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 2.225 meter di Kabupaten Enrekang, Gowa, Soppeng, Wajo, Jeneponto, Takalar, Maros, Luwu Utara, Bantaeng, Kota Makassar; c) Pengadaan Motor Pengangkut Sampah sejumlah 2 unit yang melayani 845 rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur..

#### **4. Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

- Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman

Dokumen Perencanaan yang tersusun pada sub kegiatan ini sebanyak 18 Dokumen yaitu Dokumen Identifikasi Kebutuhan PSU pada 7 Kab/Kota diantaranya Kab. Bantaeng, Kab. Gowa,

Kab. Luwu, Kab. Soppeng, Kota Makassar dan Kabupaten Wajo, selain itu juga tersusun Dokumen DED Kebutuhan PSU Permukiman pada Kab. Gowa, Kab. Luwu Utara, Kota Parepare, Kota Makassar, Kab. Wajo, Kab. Bantaeng dan Kab. Takalar serta 4 Dokumen UKL-UPL PSU Permukiman Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Luwu Utara, Kab. Sinjai.

- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi permukiman

Pada tahun 2022 telah dibangun PSU kawasan permukiman yang meliputi: a) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 2.401 meter di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Gowa, Takalar, dan Kota Palopo; b) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.236 meter di Kabupaten Luwu, Bone, Toraja Utara, Takalar, dan Luwu Utara; c) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan permukiman berupa reservoir beton kapasitas 9.500 liter dengan panjang pipa distribusi 1.995 meter di Kabupaten Sinjai serta tandon kapasitas masing-masing 2.000 liter dengan total panjang pipa distribusi 4.427 meter di Kabupaten Sinjai, Jeneponto, Bone, dan Kota Makassar; d) Pembangunan PSU lainnya berupa pembangunan toilet 2 unit di Kabupaten Enrekang dan Kota Makassar serta Rehabilitasi Masjid di Kota Makassar. Selain itu dalam rangka peningkatan penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air lainnya, telah dibangun sejumlah 10 unit instalasi air siap minum (ARSINUM) dengan kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan layanan 625 rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pinrang, Enrekang, Jeneponto, Bulukumba, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, dan Sinjai.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Koordinasi dan Sinkronisasi yang telah dilakukan menghasilkan Rekomendasi Rencana Kebutuhan PSU utamanya pada Kawasan Penyanggah Ibu kota Kabupaten. Jumlah rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 6 rekomendasi untuk 7

Kab./Kota yaitu Kab. Bantaeng, Kab. Gowa, Kab. Luwu, Kab. Soppeng, Kab. Takalar Kab. Wajo dan Kota Makassar.

- Sub kegiatan Kerjasama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman

Kerjasama yang dilaksanakan yaitu berupa Rencana penanganan PSU Permukiman di Kota Palopo dimana hasil koordinasi bahwa pihak Pemda kota Palopo dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyediakan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Lingkungan dan Pihak Pemerintah Provinsi mengupayakan kebijakan anggaran untuk penanganan hasil perencanaan Kab./Kota sesuai kewenangan provinsi.

## **5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**

- a. Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi

- Pemberitahuan Pendataan Awal Lokasi Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Fasilitasi Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi sejumlah 8 kegiatan pengadaan tanah antara lain proyek prioritas provinsi dan proyek strategis Nasional yang permohonannya diajukan pada akhir tahun 2021 tetapi dilakukan perpanjangan dan penetapan lokasinya pada tahun 2022. Adapun kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimaksud antara lain :

1. Pembangunan Jalan Bypass Mamminasata di Kabupaten Maros seluas  $\pm 15,21$  Ha;
2. Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare (Segmen E) untuk Kabupaten Maros dan Kota Makassar seluas  $\pm 83,94$  Ha;
3. Pembangunan Runway Bandara Bua di Kabupaten Luwu seluas  $\pm 18$  Ha;
4. Pembangunan Akses Jalan Bandara Bua-Toraja Utara di Kabupaten Luwu seluas  $\pm 8,37$  Ha;

5. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Baliase di Luwu Utara seluas  $\pm 30,15$  Ha;
6. Pembangunan Genangan Tanggul Hulu Bendung D.I Gilireng di Kabupaten Wajo seluas  $\pm 67,43$  Ha;
7. Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar seluas  $\pm 307,27$  Ha;
8. Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Gowa seluas  $\pm 47$  Ha.

## **6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

- a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam satu Daerah Provinsi

Data yang tersusun merupakan data sengketa pertanahan berdasarkan aduan yang masuk. Jumlah aduan sebanyak 6 kasus.

- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah Provinsi

Jumlah Sengketa Tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang difasilitasi Tahun 2022 terdapat 6 pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan, Mewakili A.n. Mardiana, Dkk Perihal Gugatan Perbuatan melawan Hukum, pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep.
2. Surat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan, Mewakili A.n. Darwis, Dkk. Perihal Gugatan Perbuatan melawan Hukum, pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep.
3. Surat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan, Mewakili A.n. Ilham, Dkk Perihal Gugatan Perbuatan melawan Hukum, pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Rel Kereta Api di Kabupaten Barru.

4. Surat Andi Megawati Binti Alimuddin, tanggal 16 Februari 2022 hal Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah eks Dinas Peternakan.
5. Surat dari LAW FIRM an. DR. Muhammad Nur, SH, MH & Associates advocates-Legal Consultans Nomor : 171/ADV.MN/II/2022, tanggal 18 Februari 2022 Perihal Penolakan Perpanjangan Izin HGU PT. London Sumatera.
6. Surat Kejaksaan Negeri Wajo Nomor : SP-93/P.4.19/Fd.1/09/2022, tanggal 29 September 2022. Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Gilireng di Kabupaten Wajo.

## **7. Program Penatagunaan Tanah**

Kegiatan Penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota serta kegiatan Konsolidasi dan Koordinasi yang dilakukan pada Tahun 2022 antara lain :

1. Melakukan Koordinasi terkait tentang Permohonan Persetujuan Izin Pelepasan Tanah Kas Desa di Kabupaten Wajo.
2. Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah di Kab Bone.
3. Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv Sulawesi Selatan sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah Kab. Sinjai.
4. Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah Kab. Bulukumba.
5. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah di Kabupaten Soppeng.
6. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah di Kabupaten Soppeng.
7. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kosolidasi Tanah Kewenangan Provinsi di Kabupaten Takalar.

## **8. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- a. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah

Proses Pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait diantaranya: 1) Koordinasi Lanjutan bersama Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI); 2) Pembuatan Surat Keputusan (SK) Gubernur Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan; 3) Sosialisasi dengan OPD daerah; 4) Rapat Koordinasi Lanjutan bersama Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (SRP2); 5) Konsultasi dengan Direktorat Jendral Perumahan mengenai penerbitan Sertifikat Pengembang Perumahan (SP2); 6) Penyuluhan mengenai Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan; 7) Penerbitan Sertifikat Pengembang Perumahan (SP2)

#### **2.1.4. Faktor penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2022 antara lain :**

Adapun penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2022 antara lain :

1. Besarnya komitmen pimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Perencanaan dan pelaksanaan yang matang dan fokus dalam pencapaian target kinerja;
3. Meningkatnya pemahaman pejabat struktural dan fungsional serta staf tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan;

4. Adanya *Standar Operasional Prosedur (SoP)* di lingkup Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Kinerja telah dijabarkan (*cascading*) ke dalam kinerja setiap level jabatan dan staf;
6. Tingginya minat SDM saat ini untuk memahami kinerja dan implementasinya;
7. Dibentuk Tim Perencana dimasing-masing Bidang dan UPT Rumah Susun.

**2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target pada sasaran renstra Dinas Perkimtan sebagai berikut:**

1. Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah terselenggara dengan baik
2. Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi
3. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman
4. Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak

**2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:**

1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas program yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra untuk tahun anggaran berikutnya.
2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala
3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan.
4. Melakukan Evaluasi Program dan Kegiatan secara berkala untuk memberikan gambaran komprehensif terkait capaian kinerja program dan kegiatan tahun berjalan serta mengungkap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut.



5. Meningkatkan koordinasi internal dalam hal penyusunan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan dalam hubungannya dengan pembagian anggaran kas, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan tepat waktu.
6. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dan didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Prestasi Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tiga tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja sasaran (*impact*), program (*outcomes*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan (*intermediate outcome*) jangka menengah dan indikator sub kegiatan (*output*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai

pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada Visi dan Misi serta Indikator Kinerja yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diukur melalui Indikator kinerja pada table berikut.

**Tabel II.9 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel (Tc. 30)**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analistis
					Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
2	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%	-		100%	100%	100%	100%	30%	100%	Mencapai Target
3	Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	100%		14,29%	57,14%	100%	7,15%	57,14%	100%	Tidak Mencapai Target
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)		36.37%		13.69%	23.42%	36.37%	18.03%	25,39%	36.37%	Melebihi Target
5	Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman		93%		91%	92%	93%	93,89	97,36%	93%	Melebihi Target
6	Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman		100%		60%	80%	100%	195.9%	100%	100%	Mencapai Target
7	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
8	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analistis
					Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
9	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
10	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		100%		100%	100%	100%	100%	35,46%	100%	Tidak Mencapai Target
11	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target
12	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		100%		100%	100%	100%	73,63%	50,39%	100%	Tidak Mencapai Target
13	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota		100%		100%	100%	100%	93,80%	100%	100%	Mencapai Target

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dalam menyelesaikan Masalah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta di Bidang Pertanahan, solusi yang dilakukan harus disesuaikan harus disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat. Isu strtegis menjabarkan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah serta dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, capaian program nasional maupun internasional, seperti SPM dan *SDG's*; serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran.

Isu-isu strategis yang menjadi kewenangan terkait pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijabarkan melalui beberapa point berikut:

1. Tingginya *Backlog* Perumahan
2. Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*).
3. Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
4. Rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
5. Tingginya intensitas bencana yang terjadi mengakibatkan semakin tingginya korban bencana yang memerlukan Rumah layak huni
6. Masih tingginya luas kawasan kumuh utamanya yang menjadi kewenangan provinsi yaitu sebesar 1.151,79 ha

7. Masih rendahnya cakupan Air Minum Layak utamanya pada daerah Pesisir dan Kepulauan serta Daerah Rawan Air Lainnya
8. Pembangunan PSU dalam menunjang fungsi permukiman masih rendah. Seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, fasilitas persampahan serta Fasilitas Umum Lainnya
9. Belum optimalnya pemenuhan data terkait perumahan dan permukiman, sehingga menyebabkan perencanaan yang dilakukan belum bisa memenuhi kebutuhan dan kondisi real di lapangan secara tepat.
10. Belum optimalnya Fasilitas Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum
11. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan
12. Belum Optimalnya Sistem Informasi Pertanahan.

Berdasarkan Isu-isu strategis atau permasalahan yang telah diuraikan di atas terkait Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, maka beberapa strategi yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keungguan SDM Aparatur untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
2. Meningkatkan akses Data, Informasi dan Inovasi yang terkait pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan ketersediaan Rumah layak Huni dan Infrastruktur layanan dasar pada kawasan permukiman yang berkualitas dan aksesibel
4. Meningkatkan Layanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Sulsel Tahun 2024 merupakan Pedoman sebagai langkah awal bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan yang berisi program dan Kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan Program yang tepat sasaran. Selain berpedoman pada Ranwal RKPD pelaksanaan Forum Perangkat Daerah juga diharapkan mampu

memberikan masukan dalam rangka penajaman target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2024.

Rancangan Pagu Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2024 pada Ranwal RKPD Tahun 2024 sebesar **Rp.52,939,274,504,-**. Perbandingan Rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Program Kegiatan dan Sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.10 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan (T.C. 31)**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				52,047,426,087	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				810,118,854,478	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (%) Rata-rata Nilai SKP ASN (%) Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	100%  100%  100%	19,484,255,233	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	100%	19,992,529,554	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (%)	100%	1,127,866,900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (%)	100%	1,127,866,900	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	739,493,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	739,493,400	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	60,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	60,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	50,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	35,000,000	



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	35,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	87,507,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	87,507,000	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	120,866,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	120,866,500	
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)</b>	<b>100</b>	<b>11,576,328,489</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)</b>	<b>100</b>	<b>11,984,602,810</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	97	11,131,053,689	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	97	11,539,328,010	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	35,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	35,000,000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	77,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	77,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	213,274,800	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	213,274,800	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	15,000,000	
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	40,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	40,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	3	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	3	15,000,000	
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	50,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	50,000,000	
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Laporan)</b>	<b>4</b>	<b>185,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Laporan)</b>	<b>4</b>	<b>185,000,000</b>	
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	35,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	35,000,000	
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	75,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	75,000,000	
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	75,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	75,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Laporan)	1	25,000,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Laporan)	1	25,000,000	
Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	25,000,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	25,000,000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)	1	870,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)	1	870,000,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2	210,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1	210,000,000	
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	135,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	135,000,000	
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	100,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	100,000,000	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	120	225,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	120	225,000,000	
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	200,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	200,000,000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)	1	575,052,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)	1	585,052,500	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1	75,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1	75,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kantor yang Disediakan (Paket)					Kantor yang Disediakan (Paket)			
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	100,052,500	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	100,052,500	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	400,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	400,000,000	
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)</b>	<b>1</b>	<b>200,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)</b>	<b>1</b>	<b>280,000,000</b>	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	10,000,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	10,000,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	50,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	50,000,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	150,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	150,000,000	
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)			Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	10,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	50,000,000	
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)</b>	1	2,921,986,576	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)</b>	1	2,921,986,576	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	475,083,532	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	475,083,532	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	2,446,903,044	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	2,446,903,044	
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)</b>	1	2,003,020,768	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)</b>	1	2,013,020,768	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	1,306,856,415	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	1,306,856,415	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	225,444,353	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	225,444,353	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	70,720,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	70,720,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	10,000,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	400,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	400,000,000	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (%)	100  100	4.750.000.000	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (%)	100  100	31,970,000,000	
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi (Dokumen)	5	1,700,000,000	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi (Dokumen)	5	1,700,000,000	
Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	300,000,000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	300,000,000	
Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	500,000,000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	500,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	300,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi		Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	300,000,000	
Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)	1	300,000,000	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi		Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)	1	300,000,000	
Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	1	300,000,000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi (Dokumen)	1	300,000,000	
<b>Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>		<b>Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi (Orang)</b>	<b>140</b>	<b>970,000,000</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>		<b>Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi (Orang)</b>	<b>150</b>	<b>970,000,000.00</b>	
Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	50	250,000,000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	50	250,000,000	
Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	30	150,000,000	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	30	150,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1	120,000,000	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1	120,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi (Dokumen)	1	150,000,000	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi (orang)	10	150,000,000	
Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP (Orang)	30	150,000,000	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	30	150,000,000	
Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	30	150,000,000	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	30	150,000,000	
<b>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>		<b>Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)</b>	<b>30</b>	<b>2.080.000.000</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>		<b>Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)</b>	<b>10</b>	<b>29,300,000,000</b>	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	10	300.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	10	29,300,000,000	Rehab Rumah Korban bencana ditambah PSU daerah rawan bencana
Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	2	250,000,000						Sub kegiatan tidak terdapat pada Kepmendagri 900.1.15.5-1317
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	20	1,530,000,000						



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi (%)	5.18	7,621,139,954	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi (%)	4.46	79,704,294,024	
Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1	1,334,821,560	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1	1,004,294,024	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1	201,701,024	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1	201,701,024	
Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (laporan)	1	802,593,000	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh		Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	200	802,593,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukim an Kembali Permukiman kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh (laporan)	1	330,527,536						Sub kegiatan tidak terdapat pada Kepmendagri 900.1.15.5-1317
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas Kawasan Kumuh Tertangani (Ha)	50	6,286,318,394	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas Kawasan Kumuh Tertangani (Ha)	50	78,700,000,000	
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Dokumen)	10	1,273,890,026						Sub kegiatan tidak terdapat pada Kepmendagri 900.1.15.5-1317

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	50 Ha	5,012,428,368	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				78,700,000,000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada Kawasan Permukiman (%)	26.67	18,300,000,000	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada Kawasan Permukiman (%)	26.67	661,875,000,000	
		Persentase drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman (%)	25.71				Persentase drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman (%)	25.71		
		Persentase jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman (%)	16.67				Persentase jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman (%)	16.67		
<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>		<b>Jumlah Kawasan Permukiman Yang Terbangun PSU (Kawasan)</b>	12	18,300,000,000	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>		<b>Jumlah Kawasan Permukiman Yang Terbangun PSU (Kawasan)</b>	12	661,875,000,000	
Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	10	2,000,000,000	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	10	2,000,000,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (Lokasi)	43	15,500,000,000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (Lokasi)		659,075,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	1	300,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	1	300,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	100,000,000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	100,000,000	
Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman (Dokumen)	1	400,000,000	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman (Dokumen)	1	400,000,000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		<b>Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)</b>	<b>7.5</b>	<b>350,000,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		<b>Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)</b>	<b>7.5</b>	<b>350,000,000</b>	
Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU (Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan)	15	350,000,000	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU (Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan)	15	350,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah (Laporan)	1	350,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah (Laporan)	1	350,000,000	
<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>		<b>Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)</b>	<b>100</b>	<b>355,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>		<b>Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)</b>	<b>100</b>	<b>15,040,000,000</b>	<b>pembayaran UGR Bandara Bua Kab. Luwu</b>

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi (Lokasi)	3	355,000,000	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi (Lokasi)	3	15,040,000,000	
Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	3	355,000,000	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	3	15,040,000,000	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase penyelesaian sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi (%)	100	548,000,000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase penyelesaian sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi (%)	100	548,000,000	
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah kasus sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah (Kasus)	5	548,000,000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah kasus sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah (Kasus)	5	548,000,000	
Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen )	6	250,000,000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen )	5	250,000,000	
Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Berita Acara )	4	298,000,000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Berita Acara )	5	298,000,000	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 Kab/Kota (%)	100	639,030,900	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 Kab/Kota (%)	100	639,030,900	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (Dokumen)	1	639,030,900	Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (Dokumen)	1	639,030,900	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	1	379,030,900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	1	379,030,900	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	260,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	260,000,000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah ke atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Selain itu terdapat pula Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD, ini juga ditekankan dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda tentang RPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD telah diinput kedalam aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* dalam SIPD kemendagri. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar yang terkait dengan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel adalah Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman melalui pembangunan prasarana Sarana dan Utilitas umum. Berikut merupakan usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan berdasarkan hasil Validasi oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

**Tabel II. 11 Usulan Program kegiatan berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD  
Prov. Sulsel (TC.32)**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengembangan Perumahan		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM)		Diakomodir dengan catatan memenuhi Syarat-Syarat Readiness Criteria dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan Provinsi (SPM)		
1.1	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun		
1.1.2	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi		
	Pembangunan Rumah bagi korban bencana	Kab. Pangkep	Jumlah Rumah korban bencana yang terbangun	10 unit	
	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Kab. Maros	Jumlah Rumah korban bencana yang direhabilitasi		
	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Galesong Utara, Kab. Takalar	Jumlah Rumah korban bencana yang direhabilitasi		
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pada daerah rawan bencana	Kecamatan Turikale, Kab. Maros	jumlah PSU Permukiman yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pada daerah rawan bencana	10 kecamatan, Kab. Maros	jumlah PSU Permukiman yang terbangun	10 paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pada daerah rawan bencana	Kelurahan Biraeang Kecamatan Minasaatene Kab Pangkep	jumlah PSU Permukiman yang terbangun	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pada daerah rawan bencana	Kab. Pangkep	jumlah PSU Permukiman yang terbangun	1000 m	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pada daerah rawan bencana	Lorong Jalan Alternatif Kawasan lingkungan masjid Nur Al Ikhlas Haria Lingk. Tompobalang Kel. Tompobalang Kec. Sombaopu, Kab. Gowa	jumlah PSU Permukiman yang terbangun	1 Paket	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>				<b>Diakomodir dengan catatan memenuhi Syarat-Syarat Readiness Criteria dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>		<b>Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pesisir dan Kepulauan</b>		
<b>1.1.2</b>	<b>Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman</b>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman</b>		
	Penyusunan Dokumen Identifikasi Rencana Pembangunan RTH Perkotaan		Jumlah Dokumen yang tersedia	1 Dok	
	Penyusunan Dokumen Lingkungan PSU Permukiman	Kab. Maros. Kab. Soppeng, Kab. Wajo	Jumlah Dokumen yang tersedia	3 Dok	
	Dokumen Perencanaan PSU Permukiman	Kab. Maros	Jumlah Dokumen yang tersedia	4 Dok	
	Penyusunan Dokumen Lingkungan PSU Permukiman	Parepare, Bulukumba, Wajo, Soppeng	Jumlah Dokumen yang tersedia	3 Dok	
<b>1.1.2</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman</b>		<b>Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum</b>		



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
			<b>yang Menunjang Fungsi Permukiman</b>		
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lembang Rantebua, Kab. Toraja Utara	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Lembang Rantebua, Kab. Toraja Utara	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Tondon Mamullu, Kab. Tana Toraja	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Baruppu Selatan, Kab. Luwu Utara	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Janggo Paropo Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel. Biring Romang Kec. Biringkanaya, Sulawesi Selatan	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Romang Tangngaya Kecamtan Manggal Kota Makassar, Sulawesi Selatan	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl.Perintis Kemerdekaan li Rt 02/Rw 03 Kelurahan Taalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Sulawesi Selatan	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Ujung Bori Kelurahan Antang Kecamatan Manggala, Sulawesi Selatan	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Dusun Lengkong Desa Arolipu Kec.Wotu, Kab. Luwu Timur	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl.Perkebunan Desa Mappedeceng Kec.Mappedeceng, Kab. Luwu Utara	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan lingkungan	Dusun Salabu Desa Wewangriu Kec,Malili, Kab. Luwu Timur	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kecamatan Barombong, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kecamatan Galesong Selatan, Kab. Takalar	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kec. Liliriaja, Kab. Soppeng	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kec. Citta, Kab. Soppeng	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kec. Donri-Donri, Kab. Soppeng	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kec. Ganra, Kab. Soppeng	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kec. Lalabata, Kab. Soppeng	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kab. Jeneponto	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kab. Bantaeng	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kab. Bantaeng	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kab. Kepulauan Selayar	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kab. Tana Toraja	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kab. Toraja Utara	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel.Biringere, Kec.Sinjai Utara, Kab.Sinjai, Kab. Sinjai	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel.Balangnipa, Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai., Kab. Sinjai	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jln., Manggarupi-Jln. S Dg Lurang Kel. Paccinongan Kec. Sombaopu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Kab. Wajo	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Kabba Kecamatan Minasa Tene, Kab. Pangkajene Kepulauan	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Mawang Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Tompobalang Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Kalegowa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Pandang-Pandang Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Romangpolong Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Samata Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Tamarunang Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Tamarunang Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Paccinongang Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Pacconongan Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Katangka Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Salajangki Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	500 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	500 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kelurahan Bontoramba Kec. Somba Opu, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	300 m	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Balla Kec. Bajo, Kab. Luwu	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Patondonsalu, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel. Bangkala, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel. Juppandang, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel. Ongko, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel. Puserren, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Mundan, Kec. Masalle, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Pekalobean, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Batu Ke&De, Kec. Masalle, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Salassa, Kec. Curio, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Balla Kec. Bajo, Kab. Luwu	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Patondonsalu, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel. Bangkala, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel. Juppandang, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel. Ongko, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel. Puserren, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Mundan, Kec. Masalle, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Pekalobean, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Batu Ke&De, Kec. Masalle, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Salassa, Kec. Curio, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Kompang Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Raja Kec. Bua Kab. Luwu, Kab. Luwu	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel. Balo Balo Kec. Belopa Kab. Luwu, Kab. Luwu	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Kurusumanga Kec. Belopa, Kab. Luwu	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	12 Titik Di 12 Kecamatan Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kecamatan Turikale, Kecamatan Mandai, Kecamatan Marusu, Kab. Maros	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Luwu, Kab. Luwu	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Kab. Gowa	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Temboe, Kec.Larompong Selatan, Kab. Luwu	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kec.Suli, Kab. Luwu	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Desa Lauwa, Kab. Luwu	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Sidrap, Kab. Sidenreng Rappang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel/Desa. Maccorawalie - Kec. Watang Sawitto - Kab. Pinrang, Kab. Pinrang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel/Desa. Kaballangan - Kec. Duampanua - Kab. Pinrang, Kab. Pinrang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel/Desa. Mattiro Ade - Kec. Patampanua - Kab. Pinrang, Kab. Pinrang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Kel/Desa. Cempa - Kec. Cempa - Kab. Pinrang, Kab. Pinrang	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Jl. Pongsimpin Lorong Jambu Kelurahan Mungkajang Kec. Mungkajang, Kota Palopo	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Rt 01 Rw 05 Lr. 06 Kel. Benteng Kec. Wara Timur, Kota Palopo	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	Dusun Batu Tongkong Desa Padang Kalua Kec Bua, Kab. Luwu	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	RT 09 RW 02 Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur, Kota Palopo	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan lingkungan	RW 01 RT 01 Lrg Dermawan Kel. Salobulo Kec. Wara Utara, Kota Palopo	jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Lembang Makuan Pare, Kecamatan Rantebua, Kab. Toraja Utara	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Jl. Bontobila 3 Kel. Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kompleks Angkasa Pura Kel. Laikang Kecamatan Birigkanaya	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Jl.Setapak Lr. 14 Rt 08 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Jl. Meranti 1 Kel. Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel Tamangapa Kec. Manggala	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Jl. Tamangapa Raya Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kab. Bantaeng	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Barembeng Kec. Bontonompo, Kab. Gowa	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1000 m	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Tallang Bulawang Kec. Bajo, Kab. Luwu	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel. Kalosi, Kec. Alla, Kab. Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang.	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	700 m	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Raja Kec. Bua, Kab. Luwu	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kabupaten Maros	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	10 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa. Benteng Sawitto - Kec. Paleteang, Kab. Pinrang	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang,	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel/Desa. Mattombong - Kec. Mattiro Sompe - Kab. Pinrang, Kab. Pinrang	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel/Desa. Pekkabata - Kec. Duampanua - Kab. Pinrang, Kab. Pinrang	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel/Desa. Siparappe - Kec. Watang Sawitto - Kab. Pinrang, Kab. Pinrang	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel/Desa. Tanra Tuo - Kec. Cempa - Kab. Pinrang, Kab. Pinrang	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Dusun Lara Desa Buntu Kamiri Kec. Ponrang, Kab. Luwu	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Dusun Olang Desa Olang Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu	jumlah drainase Lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan SPAM Permukiman	Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar	jumlah SPAM yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan SPAM Permukiman	Desa Lakawali & Lakawali Pantai Kec.Malili, Kab. Luwu Timur	jumlah SPAM yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan SPAM Permukiman	Kab. Bantaeng	jumlah SPAM yang terbangun	3 Paket	
	Pembangunan SPAM Permukiman	Kab. Jeneponto	jumlah SPAM yang terbangun	2 Paket	
	Pembangunan SPAM Permukiman	Kab. Kep. Selayar	jumlah SPAM yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan SPAM Permukiman	Dusun Kuari Desa Asuli Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur	jumlah SPAM yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan SPAM Permukiman	Desa Batu Lappa Kec. Patinpeng, Kab. Bone	jumlah SPAM yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan SPAM Permukiman	Desa Sohiring Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai	jumlah SPAM yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan SPAM Permukiman	Lembang Tapparan Utara, Kec. Rantetayo, Kab Tana Toraja, Kab. Tana Toraja	jumlah SPAM yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan SPAM Permukiman	Kelurahan Tuara Kecamatan Enrekang, Kab. Enrekang	jumlah SPAM yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Fasilitas Umum (mesjid)	Dusun Tangke Balla Desa Tana Bangka Kec.Bajeng Barat Kab.Gowa, Kab. Gowa	Jumlah Fasilitas yang terbangun	1 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Fasilitas Umum (mesjid)	Bonto Bila Kel.Tubajeng Kec.Bajeng Kab Gowa, Kab. Gowa	Jumlah Fasum yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Fasilitas Umum (mesjid)	Dusun Cambaya Desa Julukanaya Kec.Pallangga Kab.Gowa, Kab. Gowa	Jumlah Fasum yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Fasilitas Umum (mesjid)	Perumahan Andi Tonro Permai Kel.Bonto Bontoa Kec.Somba Opu Kab.Gowa, Kab. Gowa	Jumlah Fasum yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Fasilitas Umum (mesjid)	Dusun Cilallang Desa Kanjilo Kec.Barombong Kab.Gowa, Kab. Gowa	Jumlah Fasum yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Fasilitas Umum (mesjid)	Kampung Parang Kel.Lembang Parang Kec.Barombong Kab.Gowa, Kab. Gowa	Jumlah Fasum yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Fasilitas Umum (mesjid)	Kel/Desa. Benteng Paremba - Kec. Lembang - Kab. Pinrang, Kab. Pinrang	Jumlah Fasum yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Fasilitas Umum (MCK)	Kecamatan Bontoa, Kab. Maros	Jumlah Fasum yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Fasilitas Umum (MCK)	Kecamatan Maros Baru, Kab. Maros	Jumlah Fasum yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Fasilitas Umum (MCK)	Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Jumlah Fasum yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Fasilitas Umum (MCK)	Desa Tallang Bulawang Kec. Bajo Kab. Luwu, Kab. Luwu	Jumlah Fasum yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Fasilitas Umum	Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar	Jumlah Fasum yang terbangun	1 Paket	
2	<b>Program Kawasan Permukiman</b>		<b>Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)</b>		<b>Diakomodir dengan catatan memenuhi Syarat-Syarat Readiness Criteria dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah</b>
2.1	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>		<b>Luas kawasan kumuh tertangani</b>		

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
2.1.1	<b>Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan	<b>Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>		
	Penyusunan DED Kawasan Kumuh	Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen DED kawasan kumuh	3 Dok	
2.1.2	<b>Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>		Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar		
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kecamatan Pattalassang, Kab. Takalar	Jumlah jalan lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Perbaikan dan peningkatan Jalan Lingkungan	Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai	Jumlah jalan lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	kecamatan mandai, Kab. Maros	Jumlah jalan lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kecamatan maros baru, Kab. Maros	Jumlah jalan lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kecamatan turikale, Kab. Maros	Jumlah jalan lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kecamatan belopa, Kab. Luwu	Jumlah jalan lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kota Parepare	Jumlah jalan lingkungan yang terbangun	1000 m	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Kel. Boting, Kec. Wara, Kota Palopo	Jumlah jalan lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh	Desa Senga Selatan, Kec. Belopa Kab. Luwu	Jumlah jalan lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman kumuh	Desa Baringing, Kab. Enrekang	Jumlah drainase lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman kumuh	Kecamatan Mangarabombang, Kab. Takalar	Jumlah drainase lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman kumuh	Kab. Pangkep	Jumlah drainase lingkungan yang terbangun	5 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman kumuh	Desa Wonokerto Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara	Jumlah drainase lingkungan yang terbangun	400 m	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman kumuh	Kecamatan Belopa, Kab. Luwu	Jumlah drainase lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman kumuh	Desa Lebani, Kec. Belopa Utara Kab. Luwu	Jumlah drainase lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman kumuh	Kel. Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo	Jumlah drainase lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman kumuh	Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo	Jumlah drainase lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman kumuh	Kel. Mungkajang, Kec. Mungkajang Kota Palopo	Jumlah drainase lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman kumuh	Kel. Lagaligo, Kec. Wara Kota Palopo	Jumlah drainase lingkungan yang terbangun	1 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman kumuh	Kel. Pajalesang Kec. Wara, Kota Palopo	Jumlah drainase lingkungan yang terbangun	1 Paket	

**Tabel: II. 12 Usulan Program kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  
Prov. Sulsel (T.C. 32)**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengembangan Perumahan		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM)		Diakomodir dengan catatan memenuhi Syarat-Syarat Readiness Criteria dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan Provinsi (SPM)		
1,1	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun		
1.1.2	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi		
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (7 Kab/ Kota)	Ujung „ Kecamatan Lilirilau, KAB. SOPPENG		1 paket	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (7 Kab/ Kota)	(DesaTuncung (3 Unit), Desa Pundi Lemo (2 Unit), KAB. ENREKANG)		1 paket	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (7 Kab/ Kota)	Lemb. To'yasa Akung, Kec. Bangkelekila' (6 unit), KAB. TORAJA UTARA)		1 paket	
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				Diakomodir dengan catatan memenuhi Syarat-Syarat Readiness Criteria dan disesuaikan dengan
2,1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		Jumlah PSU permukiman yang terbangun di kawasan Pesisir dan Kepulauan		

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
2.1.2	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		kemampuan keuangan daerah
2.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman		
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum/ Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota	Kecamatan Pasilambena, Bontoharu, dan Bontosikuyu, KAB. KEPULAUAN SELAYAR)		5 Paket	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum/ Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota	(Desa Bira Kecamatan Bontobahari, KAB. BULUKUMBA)		2 Paket	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum/ Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota	(Pulau Sembilan, KAB. SINJAI)		3 Paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kabupaten/Kota	(Kelurahan Takkalasi, Kelurahan Sumpang Binangae, Kelurahan Coppo, Kelurahan Mangempang, Lingkungan Batybessi, Taboe-Palakka, Kelurahan Tuwung, Landore-Ta" kajuara, Lembae, Panrengnge-siawung, Amesangeng-Mangempang, Jl. Anggrek-Jl. A.M. Akbar Lingkungan Jampue, Lingkungan Maralleng Desa Pao-Pao, Desa Lawallu, Desa Siddo, Kelurahan Mangkoso, Kelurahan Kiru-kiru, Desa Ajakkang Timur-Atapareng, Burancie, Desa Paccekke,		22 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		Bojo Baru, RT3 lingkungan Batubessi, KAB. BARRU)			
	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kabupaten/Kota	(Pulau Puteangin, Kel. Biangae, Kel. Coppo, Desa Palakka, Kel. Mengempang, Kel. Lompo Riaja, Desa Harapan, Desa Pao-Pao, Desa Lalabata, Desa Lasitase, Desa Lipukasi, Desa Tellumpaua, Desa Binuang, Desa Lampoko, Desa Pujananting, KAB. BARRU)		15 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota	(1. Pembangunan Rabat Beton Lingkungan Baru Doping, Kelurahan Doping, Kec. Penrang 2. Pembangunan Rabat Beton Jalan Olahraga Lingkungan Cappa Padang Kelurahan Doping Kec. Penrang 3. Pembangunan Rabat Beton Jl. Poros Salotengnga - Manyili Desa Pallimae Kec. Sabbangparu 4. Pembangunan Rabat Beton Jl. Ke lapangan Sepak bola Desa Pallimae Kec Sabbangparu, KAB. WAJO)		4 Paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota	(1. Pembangunan Jalan Beton Jl. H. Ibrahim Lingkungan menge Kec. Belawa 2. Pembangunan Rabat Beton Jl. Lapaddaga lingkungan II Kec. Gilireng 3. Pembangunan Rabat Beton lingkungan I Jl. A. Batari Kec. Gilireng 4. Pembangunan Rabat Beton Jl. Bocco-bocco lingkungan ballere Kec. Keera 5. Pembangunan Drainase Lingkungan alau salo dan lingkungan bolla mallimpong Kec. Maniangpajo 6. Pembangunan Talud Jalan Lasappo lingkungan sarasa Kel. Pammana Kec. pammana 7. Pembangunan Drainase Lingkungan baru doping Kec. Penrang 8. Pembangunan Rabat Beton lingkungan canru dan pammera Kel. Walennae Kec. Sabbangparu 9. Pembangunan Rabat Beton jalan ajuara lingkungan paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabbangparu 10. Pembangunan Rabat Beton lingkungan mualla Kel. Assorajang Kec. Sajoanging 11. Pembangunan Rabat		13 Paket	



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		Beton jl. Lure lingkungan jalang Kec. Sajoanging 12. Pembangunan Rabat Beton Kel. Pincengpute Kec. Tanasitolo 13. Pembangunan Rabat Beton lingkungan barubiccu Kel. Baru tancung Kec. Tanasitolo, KAB. WAJO)			
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota	(Kabupaten Sidenreng Rappang , KAB. SIDENRENG RAPPANG)		1 paket	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Layak Minum/ Air Bersih Permukiman Kabupaten / Kota	(- Dusun Balombong & Dusun Dama' Lembang Burasia, Lembang Bau (Pekerjaan Sumur Bor) dan (Lembang Pali, Bittuang) (Kec. Bittuang) - Ranna Sandangan (Kec. Bonggakaradeng) - Kec. Gandangbatu Sillanan - Rehabilitasi Berat Perpipaan Kalimbuang-Tumakke- Kolean -Tombang-Raya-Karassik, Dusun Sesesalu Utara, Kampung Tandingan, Lembang Banga (Pekerjaan Sumur Bor) dan Sesesalu Selatan (Kec. Rembon) - Se'pon Miallo dan Lembang Kondodewata (Pekerjaan Sumur Bor) (Kec. Mappak) - Matambik - Kampung Bayo, Lembang Paku (Pekerjaan Sumur Bor), Lembang Belau Induk (Pekerjaan Sumur Bor), Lembang Paliorong (Pekerjaan Sumur Bor),			

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		Lembang Pondingao' (Pekerjaan Sumur Bor) (Kec. Masanda) - Dusun pangleon dan dusun tonglo, Tapparan Utara dan Kelurahan Padang Iring (Pekerjaan Sumur Bor), Lingkungan Sekke, Kelurahan Tapparan (Pekerjaan Sumur Bor) (Kec. Rantetayo) - Buttu Susu, Lembang Bambalu (Kec. Kurra) , KAB. TANA TORAJA)			
	Tindak lanjut Pembangunan PSU sesuai Perencanaan/ DED yang telah selesai	(kec baebunta, kec masamba, kec mappedeceng, KAB. LUWU UTARA)		9 paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten / Kota	(Kel. Salobulo Kec.Wara Utara, Kel. Songka Kec.Wara Selatan, Kel. Binturu Kec.Wara Selatan, Kel. Takkalala Kec.Wara Selatan, Kel.Benteng Kec.Wara Timur, Kel. Sendana Kec. Sendana, Kel. Pajalesang Kec. Wara, Kel. Temmalebba Kec. Bara, Kel. Balandai Kec.Bar, Kel.		10 paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		To'Bulung Kec.Bara, KOTA PALOPO)			
3	Program Kawasan Permukiman		Persentase Luas Kawasan Kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)		Diakomodir dengan catatan memenuhi Syarat-Syarat Readiness Criteria dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
3.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas kawasan kumuh tertangani		
3.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Penyusunan Dokumen DED Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh	(Kawasan kumuh Desa Wonorejo dan Kawasan kumuh Desa Balantang, KAB. LUWU TIMUR)		2 paket	
3.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar		

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh	(Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, KAB. BANTAENG)		1 paket	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Kawasan Kumuh	(Kecamatan Bangkala Barat Kecamatan Bangkala Kecamatan Tamalatea Kecamatan Binamu Kecamatan Bontoramba Kecamatan Turatea Kecamatan Kelara Kecamatan Rumbia Kecamatan Batang Kecamatan Arungkeke Kecamatan Tarowang, KAB. JENEPONTO)		11 paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh	(Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Pandang- Pandang, Kecamatan Bontomarannu, Kelurahan Romang Lompoa, KAB. GOWA)		4 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh	1. Kelurahan Anrong appaka Kecamatan Pangkajene 2. Kelurahan Segeri Kecamatan Segeri, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN)		2 Paket	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh	(Kawasan Marannu 2, Kel. Pacongong, Kec. Paletang. SK Kumuh No. 050/332/2020, KAB. PINRANG)		2 Paket	
	Penyediaan Sarana Persampahan di Kawasan Kumuh	(Pengadaan motor sampah di kawasan kumuh cimpu kec. suli, KAB. LUWU)			
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh	(Kel. Tondon Mamullu, Kel. Ariang, Kel. Lamunan, Kel. Lapandan, Kel. Botang (Kec. Makale), KAB. TANA TORAJA)		4 paket	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh	(Desa: Jalajja (Kec. Burau), - Kalatiri (Kec. Burau), 7 - Bawalipu (Kec. Wotu),- Lampenai (Kec. Wotu),- Balo Balo (Kec. Wotu), Wewangriu (Kec.Malili), Kab. Luwu Timur)			
	Pembangunan Drainase Lingkungan Kawasan Kumuh	(Kel. Pajalesang Kec. Wara, Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang, Kel. Buntu datu Kec. Telluwana, Kel. To,Bulung Kec. Bara, Kel. Boting Kec.Wara, Kel. Malatunrung Kec.Wara Timur, Kel. Lagaligo Kec. Wara, KOTA PALOPO)		7 paket	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				
	Sosialisasi Sistem dan Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	(Kabupaten Tana Toraja, KAB. TANA TORAJA)		1 Paket	

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

**“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal,  
Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan  
Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil  
Presiden:**

***“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan  
Gotong Royong”***

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR 2020-2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor. Berikut Arah Kebijakan Kementerian PUPR yang terkait dengan tugas dan

Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan:

### **1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan**

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan *land banking* untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan *millennials*; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan

material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.

- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/ kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (*public housing*) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (*rental housing*), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7) Dukungan Pengembangan *system housing career*; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

## **2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**

*Smart living* yang tertuang dalam Visi Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:



- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

Adapun Indikasi kebutuhan pendanaan pada masing-masing program pembangunan tertera dalam tabel di bawah ini.

**Tabel III.1 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PUPR 2020 - 2024 Per Program (Rp. juta)**

PROGRAM	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	TOTAL
Program Ketahanan Sumber Daya Air	41,599,240	85,388,956	89,277,147	86,850,460	81,245,710	384,361,514
Program Infrastruktur Konektivitas	37,225,702	53,122,807	57,588,640	63,191,098	62,633,658	273,761,907
<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>29,706,385</b>	<b>38,938,073</b>	<b>35,403,320</b>	<b>38,175,437</b>	<b>33,893,935</b>	<b>176,117,151</b>
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	177,680	207,033	299,488	331,087	341,169	1,356,470
Program Dukungan Manajemen	8,949,998	10,070,279	10,877,230	11,424,530	12,131,389	53,453,430
Total					889,050,471	

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan**

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun yaitu Tahun 2024-2026 sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan pertanahan Prov. Sulsel mengacu pada Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel dalam layanannya terkait dengan Tujuan 1 dan 2 serta Sasaran 1 dan 3 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertera di bawah ini.

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang akuntabel dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dengan sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan hunian layak dan infrastruktur layanan dasar
3. Meningkatkan layanan pertanahan dalam upaya mendukung Reforma Agraria dengan sasaran strategis Meningkatnya layanan dan tata kelola pertanahan.

Selanjutnya keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel III.2 Matriks keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan  
Tujuan dan Sasaran DISPERKIMTAN Prov. Sulsel**

Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026			Tujuan dan Sasaran DISPERKIMTAN 2024-2026		
Tujuan 1	<b>Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel</b>		Tujuan 1	<b>Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang akuntabel</b>	
	<b>Sasaran 1</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah		<b>Sasaran 1</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Tujuan 2	<b>Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata</b>		Tujuan 2	<b>Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang berkelanjutan</b>	
	<b>Sasaran 3</b>	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah		<b>Sasaran 2</b>	Meningkatnya ketersediaan hunian layak dan infrastruktur layanan dasar
			<b>Tujuan 3</b>	<b>Meningkatkan layanan pertanahan dalam upaya mendukung Reformasi Agraria</b>	
				<b>Sasaran 3</b>	Meningkatnya layanan dan tata kelola pertanahan

### 3.3 Program dan kegiatan

#### 3.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas, dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis yang akan dicapai di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang diukur melalui nilai SAKIP yang tentunya diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya, (2) Meningkatnya ketersediaan hunian layak dan infrastruktur layanan dasar antara lain tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi akibat program pemerintyah provinsi, menurunnya luasan kawasan dan permukiman kumuh termasuk perbaikan RTLH serta semakin meningkatnya aksesibel infrastruktur pada kawasan permukiman, pemenuhan kebutuhan Air Minum dan Sanitasi layak. dan (3) Meningkatnya layanan dan tata kelola pertanahan yang diarahkan pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah dan penggunaan tanah kewenangan provinsi.

Selain hal tersebut diatas Faktor Pengarusutamaan Gender (PUG) juga menjadi pertimbangan dalam Penyusunan Program Kegiatan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas

kebijakan dan program pembangunan yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Tujuan umum dari pelaksanaan PUG pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah responsif gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya) dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan. Dinas Perkimtan telah melaksanakan pemenuhan 7 prasyarat pelaksanaan PUG, yang terdiri dari: (1) Komitmen; (2) Penyusunan Kebijakan; (3) Penyusunan Kelembagaan; (4) Peningkatan Sumber Daya (SDM dan PPRG); (5) Analisis Gender; (6) Data Terpilah; (7) Peran Masyarakat.

### **3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Rancangan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dengan mempertimbangkan isu-isu strategis terkait tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel yang telah dianalisis menggunakan metode SWOT yang telah diuraikan pada BAB II sebelumnya serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah maka untuk Tahun 2024 direncanakan ada 8 (Delapan) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan dengan Total Pagu Anggaran **Rp. 59,098,923,058,-** (Lima puluh Sembilan milyar Sembilan puluh delapan

juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah) yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
4. Program Penatagunaan Tanah
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Kawasan Permukiman
8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2024.

**Tabel III.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				59,098,923,058	PAD			72,047,426,087
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (%)		100%	17,623,850,491	PAD		100%	20,678,809,306
		Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah (%)		100%				100%	
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)		100%				100%	
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (%)	Makassar	100%	396,251,468	PAD		100%	1,240,653,590
1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Makassar	2	160,000,000	PAD		2	813,442,740

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Makassar	1	35,000,000	PAD		1	66,000,000
1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Makassar	1	51,251,468	PAD		1	55,000,000
1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Makassar	1	35,000,000	PAD		1	38,500,000
1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Makassar	1	35,000,000	PAD		1	38,500,000
1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Makassar	2	40,000,000	PAD		2	96,257,700



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Makassar	5	40,000,000	PAD		5	132,953,150
1.04.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)</b>	<b>Makassar</b>	<b>100</b>	<b>11,724,602,810</b>	<b>PAD</b>		<b>100</b>	<b>11,569,126,289</b>
1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Makassar	97	11,539,328,010	PAD		97	11,094,824,009
1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Makassar	1	25,000,000	PAD		1	38,500,000
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Makassar	1	27,000,000	PAD		1	84,700,000
1.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Makassar	1	43,274,800	PAD		1	219,102,280
1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Makassar	1	15,000,000	PAD		1	16,500,000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Makassar	1	30,000,000	PAD		1	44,000,000
1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Makassar	3	15,000,000	PAD		3	16,500,000
1.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Makassar	1	30,000,000	PAD		1	55,000,000
1.04.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Laporan)</b>	<b>Makassar</b>	<b>4</b>	<b>135,000,000</b>	<b>PAD</b>		<b>4</b>	<b>203,500,000</b>
1.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Makassar	1	35,000,000	PAD		1	38,500,000
1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Makassar	1	50,000,000	PAD		1	82,500,000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Makassar	2	50,000,000	PAD		2	82,500,000
1.04.01.1.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Laporan)</b>	<b>Makassar</b>	<b>1</b>	<b>25,000,000</b>	<b>PAD</b>		<b>1</b>	<b>27,500,000</b>
1.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Makassar	1	25,000,000	PAD		1	27,500,000
1.04.01.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)</b>	<b>Makassar</b>	<b>1</b>	<b>295,000,000</b>	<b>PAD</b>		<b>1</b>	<b>936,000,000</b>
1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Makassar	1	110,000,000	PAD		1	210,000,000
1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Makassar	1	35,000,000	PAD		1	148,500,000
1.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Makassar	1	50,000,000	PAD		1	110,000,000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Makassar	120	50,000,000	PAD		120	247,500,000
1.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Makassar	100	50,000,000	PAD		100	220,000,000
1.04.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)</b>	<b>Makassar</b>	<b>1</b>	<b>560,052,500</b>	<b>PAD</b>		<b>1</b>	<b>685,057,750</b>
1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Makassar	1	50,000,000	PAD		1	85,000,000
1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Makassar	1	10,000,000	PAD		1	50,000,000
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Makassar	1	100,052,500	PAD		1	110,057,750
1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Makassar	1	400,000,000	PAD		1	440,000,000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	Makassar	1	280,000,000	PAD		1	1,020,000,000
1.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Makassar	1	10,000,000	PAD		1	100,000,000
1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Makassar	1	10,000,000	PAD		1	100,000,000
1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Makassar	1	50,000,000	PAD		1	55,000,000
1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Makassar	20	150,000,000	PAD		20	165,000,000
1.04.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	Makassar	1	10,000,000	PAD		1	200,000,000
1.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Makassar	1	50,000,000	PAD		2	400,000,000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Makassar	1	2,861,986,576	PAD		1	2,969,494,929
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Makassar	1	475,083,532	PAD		1	522,591,885
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Makassar	1	2,386,903,044	PAD		1	2,446,903,044
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Makassar	1	1,345,957,137	PAD		1	2,027,476,748
1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Makassar	10	966,344,637	PAD		8	1,401,695,960
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	Makassar	15	109,200,000	PAD		22	247,988,788

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
		dan Perizinannya (Unit)							
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Makassar	20	70,720,000	PAD		20	77,792,000
1.04.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	Makassar	1	10,000,000	PAD		1	100,000,000
1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Makassar	2	189,692,500	PAD		2	200,000,000
1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)	Sulsel	100	1,666,573,617	PAD		100	5,300,000,000
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (%)		100		PAD		100	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi (Dokumen)	Sulsel	5	200,000,000	PAD		5	1,700,000,000
1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	Sulsel	1	40,000,000	PAD		1	300,000,000
1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	Sulsel	1	40,000,000	PAD		1	500,000,000
1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	Sulsel	1	40,000,000	PAD		1	300,000,000
1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)	Sulsel	1	40,000,000	PAD		1	300,000,000



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi (Dokumen)	Sulsel	1	40,000,000	PAD		1	300,000,000
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi (Orang)	Sulsel	150	274,725,200.00	PAD		150	970,000,000.00
1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	Sulsel	50	45,000,000	PAD		50	250,000,000
1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	Sulsel	30	30,000,000	PAD		30	150,000,000
1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	Sulsel	1	30,000,000	PAD		1	120,000,000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.04.02.1.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi (orang)	Sulsel	10	30,000,000	PAD		10	150,000,000
1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	Sulsel	30	94,725,200	PAD		30	150,000,000
1.04.02.1.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	Sulsel	30	45,000,000	PAD		30	150,000,000
1.04.02.1.03	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)</b>	<b>Sulsel</b>	<b>10</b>	<b>1,191,848,417</b>	<b>PAD</b>		<b>10</b>	<b>2,630,000,000</b>
1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	Sulsel	10	1,191,848,417	PAD		10	2,630,000,000
1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan</b>	<b>Sulsel</b>	<b>4.46</b>	<b>3,045,477,093</b>	<b>PAD</b>		<b>9,82</b>	<b>9,122,382,791</b>

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
		Provinsi (%)							
1.04.03.1.01	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	Sulsel	1	90,000,000	PAD		1	1,334,821,560
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	Sulsel	1	40,000,000	PAD		1	532,228,560
1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	Sulsel	200	50,000,000	PAD		200	802,593,000
1.04.03.1.02	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Kumuh Tertangani (Ha)	Sulsel	50	2,955,477,093	PAD		60	7,787,561,231
1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)	Sulsel	50	2,955,477,093	PAD		60	7,787,561,231

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
		Ha yang Dipugar (Ha)							
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada Kawasan Permukiman (%)	Sulsel	26.67	21,363,021,857	PAD		60	34,865,000,000
		Persentase drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman (%)	Sulsel	25.71		PAD		57,14	
		Persentase jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman (%)	Sulsel	16.67		PAD		55	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman Yang Terbangun PSU (Kawasan)	Sulsel	12	21,363,021,857	PAD		17	34,865,000,000
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	Sulsel	10	50,000,000	PAD		10	2,200,000,000
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang	Sulsel	43	21,163,021,857	PAD		93	31,415,000,000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
		Fungsi Permukiman (Lokasi)							
1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	Sulsel	1	40,000,000	PAD		1	450,000,000
1.04.05.1.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	Sulsel	1	40,000,000	PAD		1	150,000,000
1.04.05.1.01.0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman (Dokumen)	Sulsel	1	70,000,000	PAD		1	650,000,000
1.04.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)</b>	<b>Sulsel</b>	<b>7.5</b>	<b>200,000,000</b>	<b>PAD</b>		<b>15</b>	<b>385,000,000</b>

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU (Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan)	Sulsel	15	200,000,000	PAD		15	385,000,000
1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah (Laporan)	Sulsel	1	200,000,000	PAD		1	385,000,000
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)	Sulsel	100	15,040,000,000	PAD		100	461,103,090
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi (Lokasi)	Sulsel	3	15,040,000,000	PAD		5	461,103,090

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	Sulsel	3	15,040,000,000	PAD		5	461,103,090
2.10.04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase penyelesaian sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi (%)</b>	Sulsel	<b>100</b>	<b>80,000,000</b>	PAD		<b>100</b>	<b>596,100,000</b>
2.10.04.1.01	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah kasus sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah (Kasus)</b>	Sulsel	<b>5</b>	<b>80,000,000</b>	PAD		<b>6</b>	<b>596,100,000</b>
2.10.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen )	Sulsel	5	40,000,000	PAD		6	250,000,000
2.10.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Berita Acara )	Sulsel	5	40,000,000	PAD		6	346,100,000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 Kab/Kota (%)	Sulsel	100	80,000,000	PAD		100	639,030,900
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (Dokumen)	Sulsel	1	80,000,000	PAD		1	639,030,900
2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	Sulsel	1	40,000,000	PAD		1	379,030,900
2.10.10.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi (Dokumen)	Sulsel	1	40,000,000	PAD		1	260,000,000



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi pasca Pandemi Global *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2024 akan fokus pada upaya pemulihan dampak pandemi *covid-19* terutama pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tema yang diangkat pada RKPD Prov. Sulsel yaitu.

#### ***"Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang inklusif"***

Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 disusun mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan juga mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024-2026 serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah maka pada Tahun 2024 direncanakan ada 8 (Delapan) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan dengan Total Pagu Anggaran **Rp. 59,098,923,058,-** (Lima puluh Sembilan milyar Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah) yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
4. Program Penatagunaan Tanah
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Kawasan Permukiman
8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2024.

**Tabel. IV.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**  
**Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2024**

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				59,098,923,058	PAD	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (%) Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah (%) Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)		100%  100%  100%	17,623,850,491	PAD	
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (%)	Makassar	100%	396,251,468	PAD	
1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Makassar	2	160,000,000	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Makassar	1	35,000,000	PAD	
1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Makassar	1	51,251,468	PAD	
1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Makassar	1	35,000,000	PAD	
1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Makassar	1	35,000,000	PAD	
1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Makassar	2	40,000,000	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Makassar	5	40,000,000	PAD	
<b>1.04.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)</b>	<b>Makassar</b>	<b>100</b>	<b>11,724,602,810</b>	<b>PAD</b>	
1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Makassar	97	11,539,328,010	PAD	
1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Makassar	1	25,000,000	PAD	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Makassar	1	27,000,000	PAD	
1.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Makassar	1	43,274,800	PAD	
1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Makassar	1	15,000,000	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Makassar	1	30,000,000	PAD	
1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Makassar	3	15,000,000	PAD	
1.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Makassar	1	30,000,000	PAD	
<b>1.04.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Laporan)</b>	<b>Makassar</b>	<b>4</b>	<b>135,000,000</b>	<b>PAD</b>	
1.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Makassar	1	35,000,000	PAD	
1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Makassar	1	50,000,000	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Makassar	2	50,000,000	PAD	
1.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Laporan)	Makassar	1	25,000,000	PAD	
1.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Makassar	1	25,000,000	PAD	
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)	Makassar	1	295,000,000	PAD	
1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Makassar	1	110,000,000	PAD	
1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Makassar	1	35,000,000	PAD	
1.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Makassar	1	50,000,000	PAD	
1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Makassar	120	50,000,000	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
		dan Pelatihan (Orang)					
1.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Makassar	100	50,000,000	PAD	
<b>1.04.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)</b>	<b>Makassar</b>	<b>1</b>	<b>560,052,500</b>	<b>PAD</b>	
1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Makassar	1	50,000,000	PAD	
1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Makassar	1	10,000,000	PAD	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Makassar	1	100,052,500	PAD	
1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Makassar	1	400,000,000	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	Makassar	1	280,000,000	PAD	
1.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Makassar	1	10,000,000	PAD	
1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Makassar	1	10,000,000	PAD	
1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Makassar	1	50,000,000	PAD	
1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Makassar	20	150,000,000	PAD	
1.04.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	Makassar	1	10,000,000	PAD	
1.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Makassar	1	50,000,000	PAD	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Makassar	1	2,861,986,576	PAD	
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Makassar	1	475,083,532	PAD	
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Makassar	1	2,386,903,044	PAD	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Makassar	1	1,345,957,137	PAD	
1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Makassar	10	966,344,637	PAD	
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Makassar	15	109,200,000	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Makassar	20	70,720,000	PAD	
1.04.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	Makassar	1	10,000,000	PAD	
1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Makassar	2	189,692,500	PAD	
1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (%)	Sulsel	100  100	1,666,573,617	PAD  PAD	
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi (Dokumen)	Sulsel	5	200,000,000	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	Sulsel	1	40,000,000	PAD	
1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	Sulsel	1	40,000,000	PAD	
1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	Sulsel	1	40,000,000	PAD	
1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)	Sulsel	1	40,000,000	PAD	
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi (Dokumen)	Sulsel	1	40,000,000	PAD	
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi (Orang)	Sulsel	150	274,725,200.00	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	Sulsel	50	45,000,000	PAD	
1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	Sulsel	30	30,000,000	PAD	
1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	Sulsel	1	30,000,000	PAD	
1.04.02.1.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi (orang)	Sulsel	10	30,000,000	PAD	
1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	Sulsel	30	94,725,200	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.02.1.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	Sulsel	30	45,000,000	PAD	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	Sulsel	10	1,191,848,417	PAD	
1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	Sulsel	10	1,191,848,417	PAD	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi (%)	Sulsel	4.46	3,045,477,093	PAD	
1.04.03.1.01	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	Sulsel	1	90,000,000	PAD	
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	Sulsel	1	40,000,000	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	Sulsel	200	50,000,000	PAD	
1.04.03.1.02	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Kumuh Tertangani (Ha)	Sulsel	50	2,955,477,093	PAD	
1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar (Ha)	Sulsel	50	2,955,477,093	PAD	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada Kawasan Permukiman (%)	Sulsel	26.67	21,363,021,857	PAD	
		Persentase drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman (%)	Sulsel	25.71		PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman (%)	Sulsel	16.67		PAD	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman Yang Terbangun PSU (Kawasan)	Sulsel	12	21,363,021,857	PAD	
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	Sulsel	10	50,000,000	PAD	
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (Lokasi)	Sulsel	43	21,163,021,857	PAD	
1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	Sulsel	1	40,000,000	PAD	
1.04.05.1.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	Sulsel	1	40,000,000	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.05.1.01.0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman (Dokumen)	Sulsel	1	70,000,000	PAD	
1.04.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)</b>	Sulsel	7.5	200,000,000	PAD	
1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU (Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan)	Sulsel	15	200,000,000	PAD	
1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah (Laporan)	Sulsel	1	200,000,000	PAD	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)	Sulsel	100	15,040,000,000	PAD	
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi (Lokasi)	Sulsel	3	15,040,000,000	PAD	
2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	Sulsel	3	15,040,000,000	PAD	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi (%)	Sulsel	100	80,000,000	PAD	
2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kasus sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah (Kasus)	Sulsel	5	80,000,000	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen )	Sulsel	5	40,000,000	PAD	
2.10.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Berita Acara )	Sulsel	5	40,000,000	PAD	
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 Kab/Kota (%)</b>	<b>Sulsel</b>	<b>100</b>	<b>80,000,000</b>	<b>PAD</b>	
<b>2.10.10.1.01</b>	<b>Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (Dokumen)</b>	<b>Sulsel</b>	<b>1</b>	<b>80,000,000</b>	<b>PAD</b>	
2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	Sulsel	1	40,000,000	PAD	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.10.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi (Dokumen)	Sulsel	1	40,000,000	PAD	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab Penutup Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 diuraikan dalam Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

#### **5.1. Kaidah Pelaksanaan**

Tahun 2024 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dengan difokuskan pada Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang inklusif

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunannya Renja PD berlandaskan pada prioritas pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Perencanaan pembangunan daerah pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 diimplementasikan dengan:

1. Tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dalam rangka pemulihan ekonomi dan pencapaian target sasaran pembangunan guna mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Sulawesi Selatan;

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi.

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah. Renja PD sebagai dokumen perencanaan tahunan OPD, berisi tentang rancangan program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Rencana pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan

program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada dalam Renja Tahun 2024 dengan sebaik baiknya.
2. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
3. Pada akhir tahun anggaran 2024, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPD/Renstra serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

## 5.2. Kesimpulan

1. Penyusunan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2024.
3. Pelaksanaan Program/Kegiatan diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk Tahun 2024 yaitu: **"Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang inklusif"** sehingga program kegiatan mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas

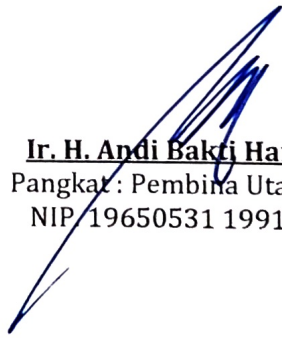
dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.

5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 ini disusun, guna menjadi pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun berjalan, dan semoga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, *Enhancing Your life for better tomorrow*

Makassar, 24 Juli 2023

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel



**Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP/19650531 199111 1 011